LAPORAN AKHIR

PRAKTIK MODERASI BERAGAMA DI LEMBAGA PUBLIK: STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA (BSI), PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN), SMAN 53 JAKARTA, DAN MAN INSAN CENDEKIA SUMATRA BARAT

MEI - 2023

PROGRAM STUDI AGAMA DAN LINTAS BUDAYA
CENTER FOR RELIGIOUS AND CROSS-CULTURAL STUDIES
GRADUATE SCHOOL, UNIVERSITAS GADJAH MADA

LAPORAN AKHIR

PRAKTIK MODERASI BERAGAMA DI LEMBAGA PUBLIK: STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA (BSI), PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN), SMAN 53 JAKARTA, DAN MAN INSAN CENDEKIA SUMATRA BARAT

Penyelia Aksara:

Amanatia Junda

Tim Penyusun:

Mohammad Iqbal Ahnaf
Agus Muhammad
Anis Fuadah

Penyelaras Akhir:

Abdul Waidl
AD Eridani
Alyaa Nabiilah Zuhroh
Rizka Antika
Hendrikus Rizki Visanto
Syafira Khairani

Sampul dan Tata Letak

Ukuran 210mm x 297mm
Jumlah Halaman 89 Halaman + Cover
Mei, 2023

Layouter
Dwiyana Putra

INFID
Jl. Jatipadang Raya Kav 3 Nomor 105 Jakarta Selatan
www.infid.org

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF 2

DAFTAR ISTILAH 7

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR 8

KATA PENGANTAR 9

BAB I. PENDAHULUAN 13

1.1 Latar Belakang 13

1.2 Tujuan dan Rumusan Masalah 15

1.3 Kerangka Konseptual dan Metode Penelitian 15

BAB II.TEMUAN PENELITIAN 20

2.1 Pemaknaan Moderasi Beragama di Tengah Kontestasi Tafsir 21
2.1.a. Narasi Penerimaan Afirmatif terhadap Moderasi Beragama 23
2.1.b.Penerimaan Kritis: Koridor dan Kewaspadaan 28

2.2 Praktik Moderasi Beragama 33
2.2.a. Praktik Moderasi Beragama di BSI 34
2.2.a.i. Perubahan melalui Dress Code 34
2.2.a.ii. Kultur Moderasi Beragama melalui Core Values Perusahaan 36
2.2.a.iii. Sentralisasi Manajemen Lembaga Sosial Keagamaan 37
2.2.b. Praktik Moderasi Beragama di PLN 40
2.2.b.i. Restrukturisasi Pengelolaan Ruang Keagamaan 41
2.2.b.ii. Core Values, Ranger, dan Kultur Inklusif 45
2.2.b.iii. Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan 46
2.2.c. Praktik Moderasi Beragama di SMAN 53 Jakarta 49
2.2.c.i. Supervisi Kegiatan Keagamaan 54
2.2.c.ii. Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Damai 57
2.2.c.iii. Cahaya Cinta dan Budaya Moderasi Beragama di Sekolah 58
2.2.d. Praktik Moderasi Beragama di MAN Insan Cendekia Sumatra Barat 61
2.2.d.i. Moderasi Beragama dalam Toleransi Intra-Agama dan Kesalehan 64
2.2.d.ii. Moderasi Beragama, Relasi Gender, dan Keragaman Berbusana 65

2.3. Resistensi, Negosiasi, dan Keterbatasan 70
2.3.a. BSI dan SMAN 53 Jakarta: Dari Resistensi ke Konformisme 70
2.3.b. PLN dan MAN Insan Cendekia: Negosiasi Moderasi Beragama 73

2.4. “Minoritas” Perempuan dan Non-Muslim dalam Praktik Moderasi Beragama 79

BAB III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 83

3.1. Kesimpulan 83

3.2. Rekomendasi 87

Ringkasan Eksekutif

Masalah dan Tujuan Penelitian

Tahun 2019, pemerintah mencanangkan program penguatan moderasi beragama menjadi salah satu program prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Program ini adalah langkah strategis pemerintah untuk mencegah perluasan pengaruh ekstremisme keagamaan, memperkuat toleransi dan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat agama. Dengan anggaran mencapai Rp3.2 Triliun (di Kementerian Agama saja), kampanye moderasi beragama dilakukan secara masif dan menimbulkan respons yang beragam. Selain respons afirmatif dan konformis, moderasi beragama juga mendapat kritik dan serangan. Sebagian aktivis Hak Asasi Manusia yang mengkritik moderasi beragama kurang berpihak pada perlindungan kelompok minoritas, sementara gerakan politik Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia menuduh moderasi beragama sebagai gagasan yang menyimpang, dapat melemahkah akidah dan mengusung semangat anti-Islam. Setelah tiga tahun kampanye masif moderasi beragama, bagaimana bentuk-bentuk respon ini beresonansi di kalangan masyarakat? Perubahan apa yang dapat dilihat di sektor-sektor penting yang selama ini menjadi perhatian dalam isu radikalisme dan ekstremisme? Apa yang dicapai dan apa yang perlu dikoreksi dari kampanye moderasi beragama?

Di antara sektor penting tersebut, lembaga publik termasuk BUMN dan sekolah negeri telah lama dianggap rentan menjadi basis persebaran gagasan keagamaan intoleran dan ekstrem. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan-perubahan terkait moderasi beragama yang terjadi di empat lembaga publik, yaitu: Bank Syariah Indonesia (BSI), Perusahaan Listrik Negara (PLN), SMAN 53 Jakarta, dan MAN Insan Cendekia Sumatra Barat. Keempat kasus ini dipilih sebagai contoh lembaga publik di bawah Kementerian BUMN, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian dapat dilihat penerimaan, penolakan, praktik-praktik dampak dari kampanye moderasi beragama di lembaga yang secara langsung di bawah Kemenag sebagai *leading sector* moderasi beragama dan yang berada di luar itu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan pada periode Januari-Maret 2023. Data diambil melalui wawancara terhadap 51 responden (21 perempuan dan 30 laki-laki) dari tingkat

pimpinan tertinggi (direksi dan kepala sekolah), pimpinan unit (kepala bidang dan guru), konstituen (pegawai dan siswa), serta ahli. Selain itu data juga diambil melalui observasi terhadap lingkungan di keempat lembaga tersebut, termasuk pusat-pusat kegiatan sosial keagamaan.

Temuan Penelitian

Hasil penelitian dapat dirangkum dalam temuan-temuan berikut:

1. ***Moderasi beragama diterima dan beresonansi dalam pengalaman lokal.*** Secara umum moderasi beragama mendapatkan penerimaan tanpa penolakan baik dari segi pemaknaan maupun praktik kelembagaan. Dari segi pemaknaan, para responden mengontekstualisasikan gagasan moderasi beragama dengan sejumlah nilai yang aktual dalam kehidupan mereka seperti kesadaran untuk tidak mudah mengafirkan, nilai agar mayoritas tidak bersikap mentang-mentang dengan mengucilkan minoritas, kesadaran untuk saling menghormati keyakinan agama, dan tidak membuat sekat berdasarkan agama dalam relasi sosial. Sebagian responden juga mengaitkan moderasi beragama dengan pentingnya memahami karakter bangsa Indonesia yang plural, berasal dari kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa yang berasal dari suku dan agama yang berbeda. Pandangan nasionalisme inklusif demikian menunjukkan perbedaan dengan propaganda gerakan supremasi Islam seperti HTI yang menekankan pada asal-usul dan karakter Indonesia yang eksklusif Islam. Penerimaan yang mencerminkan resiliensi terhadap propaganda yang menyerang moderasi beragama sebagai anti-Islam ini juga terlihat dari pandangan responden yang melihat moderasi beragama memuat substansi syariah.
2. ***Praktik moderasi beragama tidak selalu mewujud atas nama program moderasi beragama.*** Merujuk pada empat indikator moderasi beragama Kemenag (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghargaan terhadap budaya lokal) secara substantif penelitian ini menemukan resonansi atau keselarasan dari keempat indikator tersebut dalam praktik-praktik kebijakan dan kebudayaan yang ada di keempat lembaga. Di lingkungan BSI dan PLN, praktik moderasi beragama secara substantif ini bisa ditemukan dalam menerapkan nilai kerja perusahaan (*corporate core values*) dan sejumlah langkah strategis untuk mencegah ekstremisme seperti sentralisasi pengelolaan rumah ibadah, kode

etik penceramah keagamaan dan pengelolaan bantuan sosial. Di BSI kebijakan *dress code* yang membatasi pilihan mode berpakaian menjadi salah satu langkah instrumental dalam memperkuat moderasi beragama.

3. ***Di lingkungan sekolah negeri, praktik moderasi beragama menemukan praktik yang sistemik dan terbatas.*** SMAN 53 Jakarta bisa menjadi contoh *best practice* moderasi beragama tanpa menggunakan label moderasi beragama. Di sekolah ini, nilai-nilai moderasi beragama seperti toleransi, antikekerasan, dan nasionalisme bisa ditemukan dalam kultur dan program-program sekolah seperti Profil Pelajar Pancasila, budaya sekolah damai, pluralitas agama dan gender baik dalam organisasi kesiswaan maupun pada kegiatan keagamaan yang mengakomodasi budaya lokal. Kerjasama dengan pihak luar dari organisasi nirlaba yang peduli terhadap isu toleransi dan perdamaian berperan instrumental dalam penguatan moderasi beragama di SMAN 53 Jakarta. Di MAN Insan Cendekia, madrasah favorit di bawah Kemenag ini praktik moderasi beragama lebih bersifat formal dan menekankan pada aspek ubudiyah. Moderasi beragama dipraktikkan dengan kegiatan seminar penguatan moderasi beragama setahun sekali, mengirim delegasi untuk mengikuti kegiatan pelatihan moderasi beragama di luar sekolah dan penunjukkan "Duta Moderasi Beragama". Dalam proses belajar atau kehidupan sehari-hari, moderasi beragama lebih banyak dikontekstualisasikan dalam toleransi intra-agama terutama dalam cara beribadah. Dengan demografi siswa yang homogen, para peserta didik kurang mendapatkan pengalaman lintas agama.
4. ***Penerimaan kritis dan praktik negosiatif moderasi beragama.*** Selain respons afirmatif di atas, penelitian ini juga menemukan pola penerimaan kritis dan praktik negosiatif yang patut menjadi catatan. Pola penerimaan kritis terhadap gagasan moderasi beragama ditemukan pada sebagian responden di PLN dan MAN Insan Cendekia. Nalar penerimaan kritis ini terlihat dari nalar kewaspadaan yang menekankan pada batasan atau koridor dalam moderasi beragama agar jangan menyentuh akidah dan terbatas pada aspek mu'amalah (hubungan sosial). Meski tidak menolak moderasi beragama, nalar kekhawatiran ini selaras dengan klaim HTI bahwa moderasi beragama dapat melemahkan akidah.

5. ***Pola negositatif menyisakan ruang bagi kekuatan lama radikal.*** Praktik negosiatif dalam moderasi beragama ditemukan dalam strategi yang menghindari pola konfrontatif, berusaha merangkul semua kelompok keagamaan. Di PLN, pola ini lahir dari perspektif perusahaan sebagai "rumah bersama" sehingga tidak ada larangan terhadap unsur yang berafiliasi dengan HTI. Pemimpin lembaga yang kebetulan beragama selain Islam mendorong untuk bersikap hati-hati dalam isu keagamaan yang diyakini sensitif.
6. ***Minoritas perempuan dan non-muslim dalam praktik moderasi beragama.*** Penelitian ini tidak menemukan praktik diskriminasi terhadap perempuan dan non-muslim yang bertentangan dengan indikator moderasi beragama di keempat lembaga. Sebaliknya, ditemukan banyak praktik baik terkait dengan kepemimpinan perempuan dan non-muslim. Tidak ditemukan kebijakan pemaksaan pakaian berdasarkan keyakinan agama di lembaga yang tidak berbasis agama. Meski demikian, ada kebijakan standardisasi berpakaian di BSI yang meski tidak bertentangan dengan norma agama Islam (aurat) tetapi tidak mengakomodasi *fashion style* aliran keagamaan yang berbeda.
7. ***Keterbatasan penelitian. Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam dua hal.*** Pertama, keempat kasus yang dipilih dalam penelitian ini belum tentu mencerminkan kasus-kasus di lembaga publik lain. Kedua, proses pengumpulan data berlangsung dalam waktu singkat dengan pemilihan responden yang dibantu oleh pimpinan lembaga. Pengamatan lebih mendalam terhadap praktik sehari-hari dan wawancara dengan kalangan yang lebih luas dapat memberikan fakta yang lebih dari temuan-temuan di atas. Hal ini terutama dibutuhkan berkaitan dengan batasan-batasan toleransi yang menjadi catatan dalam penerimaan kritis, konsistensi penerapan kode etik penceramah, SOP, dan praktik penyaluran dana sosial keagamaan sejauh mana memperhatikan nilai moderasi beragama, dan seterusnya.

Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan temuan-temuan di atas, beberapa hal di bawah ini penting dilakukan untuk memperkuat promosi moderasi beragama di sektor lembaga publik:

1. **Kementerian Agama**

» Kementerian Agama perlu mendesain implementasi moderasi beragama yang menekankan kolaborasi multistakeholder (pemerintah, sektor privat, dan masyarakat), pelibatan sebanyak mungkin kalangan dan sejauh mungkin mempertimbangkan aspek keberlanjutan yang terus-menerus karena selama ini Kementerian Agama terlalu *top down* dan *programatik*, kurang mempertimbangkan pengalaman masyarakat yang sebetulnya sudah mempraktikkan moderasi beragama, meski tidak eksplisit disebut moderasi beragama.

2. **Kementerian BUMN** perlu merancang ekosistem yang lebih memberikan daya dorong bagi penguatan moderasi beragama dan pada saat yang sama memberikan perhatian terhadap kelompok atau individu yang dapat mengancam moderasi beragama. Membiarkan kelompok atau individu yang radikal atau berpotensi radikal dapat menjadi ancaman bagi ekosistem moderasi beragama di satu sisi dan iklim korporat di sisi lain.
3. **Sekolah/Madrasah**
   - » Merespons penerimaan kritis terhadap moderasi beragama. Penerimaan kritis bukanlah hal yang sepenuhnya negatif, tetapi perlu mendapat respons agar tidak mendorong simpati terhadap ideologi ekstrem yang mengusung narasi kritis serupa.
   - » Memperkuat dan mengupayakan ide-ide kreatif praktik moderasi beragama, yang tidak sebatas program kegiatan *eventual*, tetapi mewujud dalam kebijakan dan transformasi kultur dan ekosistem kelembagaan yang ada.
   - » Mengupayakan kerjasama dengan sekolah dan lembaga publik dalam penguatan moderasi. Kerjasama dengan pihak luar terbukti berperan instrumental dalam ekosistem kelembagaan berdasarkan nilai-nilai moderasi beragama.
   - » Pimpinan madrasah dan sekolah yang memiliki demografi siswa seragam, perlu mengupayakan kegiatan yang memfasilitasi perjumpaan antar agama, termasuk perjumpaan dengan kalangan minoritas.
4. **Organisasi masyarakat sipil** perlu mendukung kontekstualisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pengalaman kelembagaan. Promosi moderasi beragama perlu memberikan afirmasi terhadap nilai dan praktik sejalan yang sudah ada.

DAFTAR ISTILAH

ACT : Aksi Cepat Tanggap
AGPAII : Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia
ASN : Aparatur Sipil Negara
BNI : Bank Nasional Indonesia
BNPT : Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BPIP : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

BUMN : Badan Usaha Milik Negara
CSR : Corporate Social Responsibility
DKM : Dewan Kemakmuran Masjid
HTI : Hizbut Tahrir Indonesia
Jahr : Diucapkan dengan suara jelas dan keras (biasanya dipraktikkan saat melakukan zikir usai salat)

Kemenag : Kementerian Agama
MAN : Madrasah Aliyah Negeri
MAN IC : MAN Insan Cendekia
MTQ : Musabaqoh Tilawatil Quran
NAPITER : Narapidana Teroris
NII : Negara Islam Indonesia
NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
PAI : Pendidikan Agama Islam
PERDIR : Peraturan Direktur
PLN : Perusahaan Listrik Negara
PPKN : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
PTN : Perguruan Tinggi Negeri
ROHIS : Rohani Islam
ROHKAT : Rohani Katolik
ROHKRIS : Rohani Kristen
RKA-KL : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Sirr : Diucapkan dengan suara pelan (biasanya dipraktikkan saat melakukan zikir usai salat)

SMAN : Sekolah Menengah Atas Negeri
TJSL : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
YBM : Yayasan Baitul Maal
ZISWAF : Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

1. **Tabel 1**. Jumlah dan Demografi Responden 12
2. **Gambar 1**. Kode Busana di BSI 25
3. **Gambar 2.** Daftar Khatib di Masjid BSI Tahun 2022 28
4. **Gambar 3.** Kriteria dan Daftar Penyaluran Dana BSI Masalah Tahun 2022 26
5. **Gambar 4**. Kode Etik Penceramah Masjid PLN 32
6. **Gambar 5**. Daftar Penceramah Masjid PLN Tahun 2023 36
7. **Gambar 6**. Perbandingan Dana Zakat *Payroll* dan *Non-Payroll* YBM PLN Tahun 2020 dan 2021 32
8. **Gambar 7**. Kegiatan keagamaan ROHIS (Keputrian) & ROHKAT di SMAN 53 Jakarta 46
9. **Gambar 8.** Pembiasaan 3S Setiap Pagi dan Budaya 3S di SMAN 53 Jakarta 49

Kata Pengantar

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa moderasi beragama menjadi modal sosial mendasar untuk pembangunan bangsa dan menjadi proyek nasional dan arah kebijakan negara. Oleh karena itu, kementerian dan lembaga harus turut serta mendukung dan melaksanakan program tersebut. Bukan hanya Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tetapi, juga kementerian yang lain termasuk Kementerian BUMN.

RPJMN saat ini telah memasuki tahun keempat (2023). Sudah ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di antaranya, pertama, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Kedua, Kementerian Agama telah membuat peta jalan dan bersama Kementerian Pendidikan berupaya mendorong moderasi beragama di lembaga pendidikan. Ketiga, di akhir Januari 2023, terbit Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 yang menetapkan Badan Moderasi Beragama sebagai salah satu Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kementerian Agama. Dan keempat, Pemerintah juga mengalokasikan dana APBN yang cukup besar untuk memastikan program moderasi beragama berjalan dan memperoleh hasil yang baik sesuai harapan dan sasaran.

Setelah kesungguhan di tingkat nasional (kementerian dan lembaga), pertanyaannya, apakah kesungguhan serupa juga tercermin (dilaksanakan) di lembaga-lembaga yang bahkan bernaung di bawah pemerintah? Apakah, misalnya, lembaga pendidikan (di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan) dan lembaga bisnis (di bawah BUMN) telah berkomitmen dan berupaya melaksanakan program moderasi beragama di masing-masing lembaga tersebut?

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Penelitian "Praktik Moderasi Beragama di Lembaga Publik" ini telah selesai dan dapat kita simak laporan hasilnya. Penelitian ini berlokasi di 2 lembaga BUMN (BSI dan PLN) dan 2 lembaga pendidikan milik pemerintah (SMAN 53 Jakarta dan MAN Insan Cendekia Sumatera Barat). Penelitian yang dilaksanakan pada Januari-Maret 2023 ini mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan besar tentang implementasi program moderasi beragama di lembaga yang bernaung di bawah pemerintah. Di dalamnya, termasuk pula melihat seberapa efektif dampak program di tingkat lapangan.

Penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh INFID yang terkait dengan perkembangan narasi moderasi beragama (non ekstremisme berkekerasan) di lembaga

pendidikan (menengah dan perguruan tinggi), lembaga peribadatan dan BUMN (2019-2022). Juga tidak terlepas dari penelitian tentang regulasi di tingkat nasional dan daerah yang mendukung atau sebaliknya (kontra produktif) terhadap upaya mendorong moderasi beragama.

Sebagian temuan dari riset ini adalah sebagai berikut. Pertama, Di lingkungan sekolah negeri, praktik moderasi beragama menemukan praktik yang sistemik dan terbatas. SMAN 53 Jakarta bisa menjadi contoh praktik baik moderasi beragama karena dilakukan tanpa menggunakan label moderasi beragama. Namun, di MAN Insan Cendekia, madrasah favorit di bawah Kementerian Agama, praktik moderasi beragama lebih bersifat formal dan menekankan pada aspek peribadatan (*'ubudiyah*) saja.

Kedua, pola penerimaan kritis terhadap gagasan moderasi beragama ditemukan pada sebagian responden di PLN dan MAN Insan Cendekia. Meski tidak menolak moderasi beragama, namun ada nalar penerimaan kritis yang terlihat dari kewaspadaan yang menekankan pada batasan atau koridor dalam moderasi beragama agar jangan menyentuh akidah dan terbatas pada aspek mu'amalah (hubungan sosial) saja.

Ketiga, praktik negosiatif dalam moderasi beragama ditemukan dalam bentuk penggunaan strategi yang menghindari pola konfrontatif, berusaha merangkul semua kelompok keagamaan. Di PLN, pola ini lahir dari perspektif perusahaan sebagai "rumah bersama" sehingga tidak ada larangan terhadap unsur yang berafiliasi dengan HTI. Pemimpin lembaga yang kebetulan beragama selain Islam mendorong untuk bersikap hati-hati dalam isu keagamaan yang diyakini sensitif.

Dan keempat, penelitian ini tidak menemukan praktik diskriminasi terhadap perempuan dan non-muslim yang bertentangan dengan indikator moderasi beragama di keempat lembaga. Sebaliknya, ditemukan banyak praktik baik terkait dengan kepemimpinan perempuan dan non-muslim. Tidak ditemukan kebijakan pemaksaan pakaian berdasarkan keyakinan agama di lembaga yang tidak berbasis agama. Meski demikian, ada kebijakan standardisasi berpakaian di BSI yang meski tidak bertentangan dengan norma agama Islam (aurat) tetapi tidak mengakomodasi gaya busana aliran keagamaan yang berbeda.

Terima kasih banyak kami haturkan kepada semua peneliti, termasuk peneliti lapangan, serta semua narasumber di lembaga pendidikan dan BUMN yang berkenan menjadi responden utama. Dan terima kasih untuk para kolega saya di INFID atas upaya memfasilitasi penelitian ini sehingga membuahkan hasil yang baik.

Selamat membaca.

Iwan Misthohizzaman

Direktur Eksekutif INFID

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Lembaga publik seperti BUMN dan sekolah negeri selama ini menjadi sorotan karena kerentanan terhadap transmisi gagasan radikal dan intoleran. Belakangan ada upaya yang cukup "agresif" baik dari negara dan masyarakat sipil untuk mendorong perubahan sehingga narasi keagamaan yang toleran dan moderat bisa mendapatkan ruang lebih dominan di lingkungan lembaga publik dan sekolah negeri.

Sejumlah penelitian terdahulu, termasuk yang dilakukan INFID[1] menemukan pola yang berbeda dari dinamika keagamaan di lembaga publik dan sekolah negeri berkaitan dengan isu intoleransi dan radikalisme. Di satu sisi, terjadi perubahan struktural yang mendukung promosi toleransi dan moderasi beragama. Di sisi lain, dampak perubahan di ranah kultural masih terbatas dan tidak jarang menemukan aksi perlawanan dari kekuatan-kekuatan lama yang memberi ruang pada narasi keagamaan yang radikal dan intoleran. Sejumlah aktor yang selama ini memegang kendali atas persebaran narasi keagamaan di sekolah dan lembaga publik bernegosiasi dengan keadaan untuk di satu sisi bersikap konformis tetapi di sisi lain berusaha mempertahankan jalur transmisi diskursus keagamaan yang beragam, termasuk yang mempunyai kecenderungan radikal dan intoleran.

Perkembangan terbaru di sejumlah tempat bahkan menunjukkan bahwa perubahan struktural tidak bisa selalu bertahan lama. Di sebuah PTN di Jawa Tengah, misalnya, perubahan struktural di level rektorat pada tahun 2017 mendorong pergeseran yang menyempitkan ruang transmisi radikalisme. Tetapi proses

1 Terarsip dalam https://www.infid.org/publication/read/degree-radicalism-campus-mosques-10-state-universities-indonesia

perubahan ini terhenti, dan kembali seperti semula, ketika terjadi pergantian pimpinan universitas pada tahun 2022. Artinya, perubahan yang didorong secara struktural belum mempunyai waktu yang cukup untuk membangun kultur baru bagi penguatan toleransi dan moderasi beragama.

Derajat keberhasilan upaya mencegah radikalisme di lembaga-lembaga publik, kampus dan sekolah negeri bergantung pada efektivitas strategi pengusung gagasan toleransi, lingkungan pendukung, dan kemapanan cengkeraman kelompok intoleran. Perkembangan di atas menyisakan pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab tentang pola dan dampak dari berbagai upaya untuk mencegah deradikalisasi di lembaga-lembaga publik, termasuk kampanye moderasi beragama yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah. Dinamika tarik-menarik ini diyakini tidak selalu seragam dan karena itu menuntut asesmen berkala sampai menemukan titik kemapanan baru, sehingga dapat menjadi pengambilan keputusan strategis bagi berbagai pemangku kepentingan yang peduli terhadap penanggulangan radikalisme dan ekstremisme.

Penelitian ini memberikan fokus perhatian terhadap implementasi kampanye moderasi beragama sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mencegah radikalisme dan ekstremisme sebagaimana tertuang dalam Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Meskipun upaya untuk mempromosikan toleransi secara umum sudah lama dilakukan, promosi moderasi beragama bisa dibilang masih ada pada tahap awal. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa implementasi program moderasi beragama tidak terjadi secara seragam di berbagai tempat. Bahkan penafsiran terhadap konsep moderasi beragama

bisa jadi juga tidak tunggal. Sehingga bisa diprediksi bahwa tingkat penerimaan dan pola implementasi kampanye moderasi beragama juga tidak selalu serupa.

I.2. Tujuan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya upaya promosi moderasi beragama, pencegahan radikalisme dan penguatan toleransi serta ragam bentuk dan pengaruhnya di sejumlah lembaga publik. Lebih lanjut penelitian ini akan memetakan ragam bentuk implementasi agenda-agenda di atas dan analisa mendalam terhadap pola-pola penerimaan dan penolakannya.

Dalam penelitian ini, istilah moderasi beragama digunakan secara konseptual sebagai gagasan keagamaan yang menekankan pada nilai toleransi, anti kekerasan, nasionalisme, dan penghargaan terhadap budaya lokal. Manifestasinya dalam ranah sosial keagamaan tidak selalu menggunakan istilah moderasi beragama tetapi mengusung substansi nilai yang sejalan.

Rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

a. Apa saja bentuk praktik moderasi beragama di masing-masing tempat?
b. Sejauh mana promosi moderasi beragama di masing-masing tempat mendapatkan penerimaan dan penolakan?
c. Bagaimana gambaran perubahan (struktural dan kultural) yang terjadi berkaitan dengan penguatan dan pelemahan pengaruh gagasan moderasi beragama di masing-masing tempat?

I.3. Kerangka Konseptual dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus PLN, BSI, SMAN 53 Jakarta, dan MAN Insan Cendekia

Sumatra Barat. Penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi moderasi beragama dan pencegahan radikalisme di empat lokus lembaga publik yang mewakili lembaga pendidikan negeri dan perusahaan milik negara. Kedua jenis lokasi ini dipilih karena mereka merefleksikan lembaga publik yang menjadi sasaran program moderasi beragama pemerintah dan secara faktual menunjukkan dinamika yang beragam.

PLN dipilih karena menurut riset P3M (2017) dan Riset INFID (2018) menunjukkan indikasi transmisi gagasan radikal yang cukup mengkhawatirkan. Sehingga perlu dilihat apakah moderasi beragama terimplementasi atau tidak di PLN. BSI dipilih karena perusahaan ini adalah hasil merger dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Dari riset P3M (2017) dan Riset INFID (2018), ketiganya terindikasi radikal. Karena itu, perlu dilihat lagi, apakah ada perubahan setelah merger (2021).

SMAN 53 Jakarta dan MAN Insan Cendekia Sumatra Barat mewakili sekolah negeri di bawah lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. SMAN 53 Jakarta belakangan mendapatkan sorotan publik karena kesalahan pemberitaan media daring terkait kasus pembatasan peran siswa non-muslim dalam kepengurusan OSIS. Kasus ini berujung dengan tindakan Dinas Pendidikan setempat yang mencopot jabatan guru yang berperan dalam praktik diskriminatif tersebut. Hal ini mencerminkan adanya benih radikalisme di lingkungan lembaga pendidikan ini yang tidak semerta-merta hilang dengan satu kasus dan tindakan koreksi yang terjadi. Sekolah kedua yang dipilih adalah MAN Insan Cendekia di Sumatra Barat, salah satu jaringan MAN unggulan di bawah Kemenag yang menarik minat siswa-siswi berprestasi dari berbagai daerah. Semua pelajar yang diterima di

MAN Insan Cendekia mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah. Patut dilihat apakah visi moderasi beragama yang menjadi agenda Kemenag tercermin dalam praktik pendidikan di sekolah unggulan di bawah lingkungannya. Jaringan MAN Insan Cendekia di Sumatra Barat dipilih untuk mendapatkan gambaran situasi di luar Jawa sekaligus melihat implikasi dari UU Sumatra Barat nomor 17 tahun 2022 yang dinilai beberapa kalangan sarat unsur diskriminasi dan berpotensi dijadikan peraturan daerah yang bernuansa syariah.

Penelitian ini menempatkan moderasi beragama sebagai model tafsir atas agama yang menekankan pada sejumlah nilai yang sejalan dengan agenda penanggulangan radikalisme dan ekstremisme. Esensi moderasi beragama menurut Kementerian Agama adalah cara beragama jalan tengah yang mencegah pemeluknya dari sikap beragama yang ekstrem dan berlebih-lebihan. Sikap beragama yang ekstrem bisa dikenali melalui sejumlah karakteristik seperti klaim kebenaran agama absolut dengan kecenderungan untuk memaksakan tafsir agama kelompok sendiri, mudah mengafirkan pihak lain, intoleran terhadap keyakinan atau agama yang berbeda, dan tidak selaras dengan ideologi kebangsaan. Kampanye sikap beragama yang moderat menurut Kementerian Agama bisa dilihat dari penerapan empat indikator, yaitu: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi.

Data penelitian dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dan telaah pustaka yang dilakukan pada periode Januari-Maret 2023. Berdasarkan kerangka konseptual di atas, fokus penelitian ini adalah praktik moderasi beragama dari segi sejauh mana sejumlah nilai-nilai moderasi beragama diterapkan sebagaimana disebut di atas ditemukan di lingkup masing-masing lembaga. Penelitian ini mengkaji bentuk implementasi, pola

penerimaan, dan penolakannya pada tiga ruang lingkup berikut:

a) Kebijakan pimpinan di masing-masing lembaga yang sejalan atau berseberangan dengan semangat moderasi beragama.
b) Praktik dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mencerminkan implementasi nilai moderasi beragama, meskipun tidak menggunakan istilah moderasi beragama.
c) Sikap konstituen masing-masing lembaga yang mencerminkan penerimaan atau penolakan nilai-nilai moderasi beragama.

Wawancara dilakukan terhadap 51 responden di keempat lokasi yang terdiri dari pimpinan lembaga, konstituen dan ahli. Di BSI dan PLN informan terdiri dari: direktur/manajemen, pengurus masjid, pengelola dana sosial, pegawai, pengelola masjid, dan jamaah masjid (dua orang). Di SMAN 53 Jakarta dan MAN Insan Cendekia Sumatra Barat, wawancara dilakukan terhadap kepala sekolah/wakasek bidang kesiswaan, guru, pengurus OSIS, pengurus ROHIS, murid, alumni dan wali murid. Berikut tabel kriteria informan:

Institusi/Lembaga	**Jenis Kelamin**		**Agama**
	Perempuan	**Laki-laki**	
BSI	3	6	Semuanya Islam
PLN	4	8	7 Islam, 2 Katolik, 2 Kristen, 2 Hindu, 1 orang
SMAN 53 Jakarta	9	9	12 Islam, 6 Kristen (Katolik & Protestan)
MAN IC Sumbar	5	7	Semuanya Islam
Total Informan	21	30	51

Tabel 1. Jumlah dan Demografi Responden

Observasi dilakukan secara terbatas terhadap lingkungan sekolah dan perusahaan. Secara khusus para peneliti melakukan observasi terhadap lingkungan dan kegiatan keagamaan di keempat lokasi.

BAB 2

TEMUAN PENELITIAN

BAB 2 TEMUAN PENELITIAN

Penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai moderasi beragama menemukan ruang persebaran yang semakin luas di lingkungan sekolah dan lembaga publik yang menjadi lokasi penelitian ini. Meskipun moderasi beragama telah menjadi program pemerintah yang diturunkan dalam peraturan, pada praktiknya kesadaran tentang pentingnya mencegah radikalisme dan ekstremisme telah cukup lama muncul yang diikuti dengan proses-proses perubahan baik secara struktural dan kultural yang secara tidak langsung mendukung implementasi moderasi beragama, baik secara eksplisit maupun substantif.

Praktik-praktik penguatan nilai yang sejalan dengan program moderasi beragama menggambarkan dua hal. Pertama adalah keragaman langkah-langkah inovatif dalam implementasi moderasi beragama dalam lingkungan yang berbeda. Kedua adalah terjadinya dinamika dan negosiasi yang harus dilalui oleh para aktor baik dalam pemaknaan maupun praktik moderasi beragama. Keempat lokasi menunjukkan adanya kesadaran tentang ancaman radikalisme dan ekstremisme, tetapi menunjukkan dinamika dan proses yang beragam dalam hal sejauh mana nilai-nilai yang termuat dalam kampanye moderasi beragama diterapkan. Secara umum penelitian di empat lokasi ini menemukan tren perubahan yang semakin kuat ke arah promosi nilai-nilai moderasi beragama, tetapi bukan tanpa keterbatasan. Perubahan-perubahan ini terjadi baik di ranah struktural maupun kultural. Hal yang berbeda dari penelitian sebelumnya adalah, di sebagian tempat, perubahan di ranah struktural telah menciptakan wujud-wujud kultur baru yang sejalan dengan nilai moderasi beragama.

II.1. Pemaknaan Moderasi Beragama di Tengah Kontestasi Tafsir

Ketika moderasi beragama diluncurkan sebagai program prioritas pemerintah melalui RPJMN 2020-2024, pemerintah mengeluarkan "panduan tafsir" atas istilah moderasi beragama yang termuat dalam buku berjudul *Moderasi Beragama* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.[1] Buku yang terbit dalam versi panjang dan pendek (buku saku) ini menjadi panduan pelatihan moderasi beragama yang ditujukan untuk kalangan baik ASN maupun swasta. Dalam buku panduan ini, pemerintah menetapkan empat indikator moderasi beragama, yaitu:

1. **Komitmen Kebangsaan:** Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi, UUD 1945, dan regulasi di bawahnya.
2. **Toleransi:** Menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kesetaraan dan sedia bekerjasama.
3. **Anti Kekerasan:** Menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan.
4. **Penerimaan terhadap Tradisi:** Ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.

Pemerintah menegaskan bahwa nilai-nilai yang menjadi indikator moderasi beragama di atas bukanlah hal baru dalam ajaran keagamaan, tetapi esensi dari ajaran agama itu sendiri. Sebelum

2 Buku Moderasi Beragama yang diterbitkan Kementerian Agama bisa diunduh di tautan berikut: https://pendispress.kemenag.go.id/index.php/ppress/catalog/view/3/1/9-1; Buku saku Tanya Jawab Moderasi Beragama bisa diunduh di https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/upload/files/Buku_Saku_Moderasi_Beragama-min.pdf

menjadi program pemerintah, gagasan moderasi beragama sudah lama muncul dengan istilah yang berbeda seperti *Islam wasathiyah* dalam konteks Islam.[2]

Meski demikian, masifnya promosi moderasi beragama mendapatkan respons dan tafsir yang beragam dari berbagai kalangan. Sejumlah situs yang berhaluan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyerang gagasan moderasi beragama sebagai hal yang berbahaya dan mengancam umat Islam. Paling tidak ada dua poin utama dari kritik HTI terhadap moderasi beragama. *Pertama*, moderasi beragama dianggap menyamakan agama yang berasal dari Tuhan dengan pemikiran manusia. Sebagai ajaran yang bersumber dari Tuhan, agama dianggap tidak memerlukan moderasi, sebagaimana hasil pemikiran manusia. *Kedua*, moderasi beragama dianggap sebagai upaya mengebiri pesan agama yang multidimensi sehingga dapat menjadi solusi seluruh urusan kehidupan; agama hanya dilihat dari segi ruhiyah, sementara aspek ideologi yang termuat dalam agama dikesampingkan. Karena itu promosi moderasi beragama di lembaga pendidikan dan berbagai sektor kehidupan umat dianggap dapat merusak akidah dan mengakibatkan pendangkalan agama karena derajat ajaran agama diturunkan pada level pemikiran manusia. Menggagas moderasi beragama dipahami sama halnya dengan meragukan kesempurnaan ajaran agama Islam.[3] Narasi-narasi penolakan terhadap moderasi beragama ditemukan di banyak linimasa, seperti di bawah ini:

> Moderasi agama yang diprogramkan pemerintah berfokus pada moderasi Islam. Hal ini dikarenakan Islam dianggap ekstrem, intoleran, dan stigma negatif lainnya. Moderasi Islam sebenarnya berusaha menyesuaikan Islam dengan ide-ide Barat, mencampuradukkan ide Barat dengan Islam. Dengan mewacanakan toleransi, Islam yang modern sesuai dengan zaman. Seharusnya zaman itu mengikuti Islam (syariat Islam).

3 M. Quraish Shihab, Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama, Lentera Hati, 2019.
4 https://www.tintasiyasi.com/2022/01/kurikulum-madrasah-tak-perlu-moderasi.html

> Namun, para pegiat moderasi memaksakan Islam (syariat Islam) harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Islam juga disamakan dengan agama lain, sama-sama mengajarkan kebaikan. Substansi moderasi sebenarnya adalah agar umat Islam menerima nilai-nilai Barat seperti demokrasi dan HAM, sekularisme.[4]
>
> Sepanjang sejarah peradaban, orang-orang kafir Barat bersama dengan agen-agennya terus berupaya menjauhkan umat Islam dari akidahnya. Mereka menggunakan sarana dan istilah yang manis dan memikat. Dengan berbagai macam ungkapan untuk mengecoh dan menyesatkan. Mereka selalu berusaha mengendalikan kaum muslim dengan berbagai program yang dapat menjangkau seluruh komponen masyarakat muslim. Tujuan utamanya yaitu menancapkan ideologi kapitalisme di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk membentuk peradaban Barat di tengah-tengah kaum muslim agar mampu menguasainya.[5]

Narasi-narasi di atas tidak secara khusus merujuk ke sumber-sumber yang menjadi acuan program moderasi beragama pemerintah, sehingga penolakan seperti ini tidak bisa dipungkiri berangkat dari asumsi-asumsi yang sudah lama berkembang terkait "*viktimisasi*" umat Islam yang umum ditemukan dalam narasi-narasi radikal. Meski demikian, karena sumber narasi-narasi di media tidak mudah dikenali berasal dari kelompok radikal atau organisasi terlarang, jangkauan pengaruhnya bisa tersebar di banyak kalangan.

II.1.a. Narasi Penerimaan Afirmatif terhadap Moderasi Beragama

Kami melacak penerimaan dan penolakan terhadap gagasan atau program moderasi beragama di empat lokasi penelitian ini. Sejauh yang kami dapatkan dari wawancara berbagai sumber dan observasi, kami tidak menemukan resistensi atau penolakan yang signifikan terhadap program moderasi beragama. Sebaliknya para responden pada umumnya menerima dan bersikap konformis terhadap agenda moderasi beragama. Ada beberapa informan,

5 https://www.wacana-edukasi.com/sinkretisme-dalam-moderasi-islam-mengikis-akidah-umat/
6 https://suaramubalighah.com/2022/01/28/moderasi-beragama-mengusung-toleransi-yang-merusak-akidah-umat/

terutama di MAN Insan Cendekia Sumatra Barat yang menerima narasi gagasan moderasi beragama dengan sedikit kewaspadaan, tetapi masih jauh dari nalar penolakan sebagaimana ditemukan dalam situs-situs HTI di atas. Sikap penerimaan yang disertai dengan nalar kewaspadaan ini dielaborasi di bagian bawah.

Para responden sebagian besar belum menerima pelatihan moderasi beragama, tetapi mereka tampak mempunyai kesadaran keagamaan yang sejalan dengan nilai-nilai moderasi beragama. Hal ini ditunjukkan dari bagaimana mereka merefleksikan apa yang sudah mereka lakukan selama ini sebagai hal yang sejalan dengan gagasan moderasi beragama meskipun tidak secara khusus menyebutnya program moderasi beragama. Nilai-nilai yang menjadi indikator moderasi beragama Kementerian Agama secara substantif bukanlah hal yang asing. Baik di lingkungan lembaga publik maupun sekolah, gagasan tentang moderasi beragama beresonansi dengan sejumlah gagasan lain yang sejalan dan sudah umum diterima oleh masyarakat seperti toleransi, kerukunan, menghormati keyakinan agama lain, *Bhinneka Tunggal Ika*, Pancasila, dan budaya lokal.

Seorang manajer di bagian CSR perusahaan PLN mengaitkan moderasi beragama dengan tuntutan untuk bekerjasama di lingkungan kerja. Menurutnya, ritme kerjasama dalam lingkungan kerja di kantor akan terancam jika para karyawan tidak bisa *jalan bareng*, dan saling menghormati keyakinan agama lain. Moderasi beragama itu menurutnya "...seperti toleransi, kerukunan beragama. Cara memahami agama kita dan menghormati agama lain, sehingga bisa bersanding dan jalan bareng."[6] Sejalan dengan penerimaan ini, seorang guru di MAN Insan Cendekia Sumatra Barat merujuk ke syariat Islam ketika memaknai moderasi beragama sebagai tuntutan untuk hidup rukun berdampingan antar umat beragama.

7 Wawancara Manajer CSR PLN, 20 Januari 2023.

Guru tersebut menyatakan:

> Kalau menurut saya secara pribadi moderasi beragama itu adalah bagian dari syariat kita. Memang Islam itu mengajarkan bagaimana hidup bermasyarakat, bagaimana hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kita, tidak sealiran dengan kita.[7]

Pemaknaan moderasi beragama dalam konteks lingkungan kerja bisa merefleksikan pandangan kebangsaan seseorang. Hal ini tercermin dari pandangan seorang pengurus Yayasan Baitul Mal (YBM) PLN. Menurutnya, Indonesia patut berterima kasih kepada para *founding fathers* yang telah meletakkan fondasi bagi sebuah negara yang dapat menjadi rumah yang aman bagi semua pemeluk agama. Baginya moderasi beragama pada dasarnya adalah upaya mengingatkan kembali warga negara tentang nilai-nilai yang esensinya sejalan dengan ideologi Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Imajinasi kebangsaan yang pluralis demikian tergambar dari pernyataan berikut:

> Indonesia adalah negara yang ramah bagi semua agama yang ada. Hidup berdampingan, baik itu di kemasyarakatan maupun lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah. Itu kekuatan Indonesia. Maka wajar dan saya kagum dengan para *founder* negeri ini membingkai Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Menjaga sendi-sendi kehidupan dengan lima sila Pancasila. Dan ketika di era sekarang dikuatkan tentang moderasi beragama menurut saya sebenarnya itu pengamalan Pancasila. Bahwa kita bareng pengamalan Bhinneka Tunggal Ika. Hanya dituangkan dan diingatkan lewat tajuk moderasi beragama."[8]

Imajinasi kebangsaan yang inklusif bisa menjadi potensi daya tahan terhadap narasi-narasi supremasi Islam yang menuntut "pengistimewaan" hak umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia. Salah satu dari argumen yang dikemukakan oleh para

8 Wawancara dengan Waka Asrama, 19 Januari 2023
9 Wawancara Pengurus YBM PLN, 27/01/2023.

pengusung gagasan supremasi Islam Indonesia merujuk pada sejarah perjuangan umat Islam dan proses kemerdekaan. Tuntutan agar Indonesia menjadi negara Islam atau mengadopsi syariat Islam dalam sistem perundang-undangan seringkali berangkat dari nalar yang melihat ini sebagai konsekuensi dari jasa para pejuang muslim yang paling besar dalam kemerdekaan. Retorika para tokoh HTI bahkan membangun imajinasi tentang asal-usul bangsa Indonesia dari kerajaan-kerajaan Islam yang mempunyai hubungan dengan Khilafah Islamiyah global yang berpusat di Turki sebelum masa kemerdekaan.[9] Narasi demikian menjadi dasar logika mayoritarianisme yang membenarkan toleransi dan persekusi terhadap minoritas di banyak tempat.

Penelusuran kami tentang penerimaan atau penolakan terhadap gagasan moderasi beragama di MAN Insan Cendekia Sumatra Barat menemukan bantahan terhadap imajinasi nasionalisme yang eksklusif Islam seperti di atas. Hal ini paling tidak terlihat dari pandangan kepala sekolah menanggapi pertanyaan tentang apa yang dipahami tentang moderasi beragama. Ia mengaitkan moderasi beragama dengan pandangan nasionalisme yang inklusif:

> Kita kan kembali kepada hakikat hidup berbangsa dan bernegara bahwasanya NKRI dilahirkan bukan dirintis dan diperjuangkan oleh orang Islam saja tapi pertama oleh kepercayaan, kan ada orang beragama tapi tidak memiliki kepercayaan begitu, Indonesia merdeka diperjuangkan oleh bangsa Indonesia yang tanpa latar belakang mohon maaf kepada keyakinan tetapi bagaimana mereka melakukan ini supaya terlepas dari penjajahan, dan pada saat itu kan seperti memperjuangkan Indonesia, ada yang dari golongan umat Islam, Kristen, ada yang dari Hindu, Buddha, Konghucu, dan ada lagi yang tidak beragama.[10]

Lebih lanjut karyawan PLN yang sehari-hari bertanggungjawab dalam mengelola dan menyalurkan dana-dana zakat, sedekah dan

10 https://www.tintasiyasi.com/2020/08/menolak-keterkaitan-nusantara-dengan.html
11 Wawancara Kepala Sekolan MAN IC Sumbar, 19 Januari 2023.

infak para pegawai PLN ini mengaitkan moderasi beragama dengan etika hubungan antara mayoritas dan minoritas di Indonesia. Sebagai seorang muslim ia merefleksikan pengalaman sebagai mayoritas yang mempunyai kecenderungan untuk "berlebihan" dan "mengucilkan" mereka yang berasal kalangan minoritas. Tetap toleran terhadap agama lain meskipun menjadi agama mayoritas, menurutnya, adalah dasar dari moderasi beragama. Dengan demikian setiap warga negara bisa saling menjaga menjalankan ibadah masing-masing dengan tenang.

Prinsip nondiskriminasi ini adalah tantangan besar dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia. Menariknya, seorang guru di SMAN 53 Jakarta memahami hal ini dan menekankan pekerjaan rumah ini ketika memaknai moderasi beragama. Ia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah di SMAN 53 Jakarta menyatakan moderasi beragama menuntut kemampuan pihak mayoritas untuk "pandai melakukan toleransi dalam kehidupan beragama. Sehingga tidak mentang-mentang sebagai pihak yang jumlahnya mayoritas boleh memperlakukan berbeda terhadap pihak yang minoritas." Diksi "tidak mentang-mentang" ini bisa menjadi koreksi bagi banyak kalangan termasuk dari Kementerian Agama yang terkadang masih menekankan pada logika mayoritas-minoritas dengan tuntutan kepada kalangan minoritas untuk "tahu diri."

Jika pemaknaan-pemaknaan terhadap moderasi beragama di atas menekankan pada sikap-sikap positif dalam konteks kehidupan beragama, penting juga melihat sejauh mana kesadaran tentang bahaya ekstremisme dipahami oleh para responden. Kesadaran demikian kami temukan dalam wawancara dengan seorang pimpinan di perusahaan BSI dan seorang guru di SMAN

53 Jakarta. Seorang pegawai BSI mempertentangkan sikap moderat dengan sikap ekstrem yang harus diwaspadai. Sikap ekstrem yang bisa menjadi ancaman moderasi, kehidupan rukun dan damai menurutnya mewujud dalam cara pandang keagamaan yang merasa benar sendiri dan gampang mengafirkan pihak lain yang banyak ia temukan di media sosial. Ia khawatir dengan mereka "yang merasa benar sendiri; semuanya salah kecuali dia. Islam dia *aja* yang benar, lainnya kafir."[11] Dalam bahasa seorang guru PPKN di SMAN 53 Jakarta, moderasi beragama menuntut kita "tidak miring ke kanan, *tidak ngidul*, berada di tengah-tengah. Tidak miring ke kiri."

Kesadaran tentang pentingnya mencegah cara beragama yang mudah mengafirkan demikian beresonansi dengan indikator moderasi agama yang lain yaitu penghargaan terhadap budaya lokal. Hal ini terlihat dari pandangan seorang *Senior Executive Vice President* PLN yang meyakini bahwa moderasi beragama hanya bisa terlaksana jika praktik keagamaan ramah terhadap kebudayaan, tidak mempertentangkan kebudayaan dengan agama. Untuk mempraktikkan moderasi beragama ia menyatakan, "Solusinya kebudayaan. Kembali lagi, kita kembalikan ke akar budayanya. Apabila kita bisa saling menghormati, kemudian saling menjaga koridor. Artinya misalnya, agamaku ya agamaku." Ia mengingatkan promosi moderasi beragama tidak bisa dilakukan secara represif, oleh karena itu jalan kebudayaan dapat membuat nilai-nilai keagamaan yang moderat lebih mudah diterima.[12]

II.1.b. Penerimaan Kritis terhadap Moderasi Beragama: Koridor dan Kewaspadaan

12 Wawancara karyawan BSI sekaligus Ketua DKM Masjid BSI 13/02/2023.
13 Wawancara Senior Executive Vice President PLN, 25/01/2023.

Toleransi, moderasi beragama, dan nilai-nilai lain yang sejalan seringkali mudah diucapkan sebagai bahasa-bahasa yang klise tetapi pemahaman dan realisasinya bisa berbeda antar orang dengan pengalaman yang berbeda. Seseorang bisa menyampaikan bahwa ia dapat bersikap toleran, tetapi dapat menarik batas yang berbeda sejauh mana bisa bersikap toleran atau moderat. Sebagaimana ditunjukkan dalam pembahasan di atas, narasi penerimaan terhadap moderasi beragama ditemukan di empat lokasi penelitian ini. Meski demikian, di beberapa tempat kami menemukan sikap penerimaan yang disertai dengan penekanan terhadap batasan dan kewaspadaan atau kekhawatiran terhadap gagasan moderasi beragama.

Pernyataan *Senior Executive Vice President* PLN yang dikutip di atas memberikan ilustrasi tentang sikap kehati-hatian ini. Di satu sisi, ia mendukung moderasi beragama dan memahami bahaya ideologi *takfiri*, tetapi di sisi lain juga mengingatkan moderasi beragama agar tidak dipromosikan secara represif dan tetap "saling menjaga koridor." Ia tidak menjelaskan lebih spesifik apa yang dimaksud dengan koridor, tetapi hal ini menyiratkan kesadaran bahwa agenda moderasi beragama tetap harus diterima secara kritis, dan pada praktiknya akan bergantung kepada masing-masing individu atau lembaga dalam menarik batas-batas, baik dalam praktik keagamaan maupun relasi-relasi sosial.

Narasi penerimaan dengan kewaspadaan paling jelas terlihat dalam wawancara kami dengan sejumlah responden di MAN Insan Cendekia Sumatra Barat, baik dari kalangan guru maupun peserta didik.

Kritik terhadap moderasi beragama dengan tuduhan melemahkan akidah tampak menemukan resonansi dalam pandan-

gan sejumlah peserta didik di MAN Insan Cendekia berikut:

> "Kalau moderasi beragama ya kalau menurut Adek. Adek kan orang Islam, kalau Adek mempelajari agama Islam, Islam itu memang sudah moderasi, saling menghargai, berkeyakinan terhadap pencipta firman yang turun langsung dari Allah jadi kalau tentang moderasi beragama nggak terlalu lah kami diajarkan cuma tu ada batasan-batasannya moderasi boleh tapi mungkin itu tentang kehidupan ibadah. Cuma nggak sampai ke akidah karena menurut Adek nggak tau kalau yang lain, kalau akidah sudah melenceng kan kunci dari Islam itu kan syahadat berarti tidak ada Tuhan selain Allah cuma kalau kita sudah mengakui agama lain yang Tuhannya beda selain Allah itu mungkin itu sudah termasuk musyrik. Jadi moderasi itu bagus cuma ada kesan dan pesannya." (Siswa MAN IC Sumbar)

> "Sejauh mana yang saya pelajari dan ketahui moderasi ini kita berusaha menghormati agama lain, menghargainya, dan bersikap toleransi dengan tidak menghilangkan Islam itu dari diri kita sendiri. Nah, jadi saya setuju aja kadang kan ada juga moderasi itu yang menyebabkan kita lalai dengan agama kita sendiri. Nah, itu menurut saya bukan moderasi tapi cuma mencari alasan untuk melalaikan agama kita sendiri, Bang." (Siswa MAN IC Sumbar)

> "Konsep moderasi beragama, saya setuju-setuju aja karena dia kan menghargai gitu kan moderat di tengah-tengah jadi asalkan kita yang memahami moderasi beragama itu nggak melenceng dari akidah, saya setuju aja, karena kita nggak ada di pihak kanan atau kiri, kita di pihak tengah-tengahnya gitu jadi kita netral, kita nggak nimbulkan konflik asalkan nggak melenceng dari akidah."(Siswi MAN IC Sumbar)

Kutipan-kutipan di atas sebenarnya menunjukkan tidak ada resistensi dan serangan terhadap gagasan dan program moderasi beragama. Tetapi penerimaan ini diterima dengan paling tidak dua catatan yang mencerminkan sikap kewaspadaan diri sebagai muslim. Yang pertama adalah agar jangan sampai moderasi beragama membuat orang "melenceng dari akidah," yang salah satu wujudnya adalah menanggalkan syahadat dengan "mengakui agama lain yang tuhannya beda selain Allah itu mungkin itu sudah termasuk musyrik." Salah seorang siswa bahkan menyatakan bahwa berkaitan tentang

moderasi beragama yang ia terima dalam pelajaran bukanlah tentang apa itu moderasi beragama, tetapi lebih pada penekanan pada batasan-batasan, seperti pernyataan berikut: "...kalau tentang moderasi beragama jadi nggak terlalu lah kami diajarkan, cuma tu ada batasan-batasannya moderasi boleh... moderasi itu bagus cuma ada kesan dan pesannya."

Kedua adalah batasan bahwa moderasi beragama sebaiknya diterapkan hanya di level *mu'amalah* atau hubungan sosial saja. Dalam bahasa Kepala Sekolah MAN Insan Cendekia Sumatra Barat, "Moderasi beragama kan bukan bagaimana kita beragama tapi bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman beragama." Padangan ini sekilas menyatakan penerimaan dan dukungan terhadap moderasi beragama, tetapi pada saat yang sama juga menyiratkan cara pandang apologetik yang menafikan perbedaan penafsiran tentang agama. Sulit memahami bahwa "cara beragama" terlepas dari pemahaman atau tafsir atas agama itu sendiri. Ekstremisme memang tidak bisa dipahami hanya masalah ideologi atau tafsir atas agama, tetapi koreksi atas penafsiran ekstremis terhadap agama adalah hal yang menjadi perhatian dalam gagasan moderasi beragama.

Dari sini terlihat narasi-narasi kewaspadaan yang mengaitkan moderasi agama dengan *viktimisasi* umat Islam, pendangkalan akidah secara sadar atau tidak menemukan resonansi di sebagian kalangan masyarakat, termasuk mereka yang tidak menentang moderasi beragama.

II.2. Praktik Moderasi Beragama

Sebagaimana ditunjukkan di awal gagasan dan program tentang moderasi beragama telah diterima cukup baik di lingkungan lembaga publik dan sekolah yang menjadi lokasi penelitian ini. Kesadaran tentang moderasi beragama tidak hanya berhenti di ranah gagasan tetapi juga diimplementasikan dalam bentuk-bentuk yang beragam sesuai dengan konteks dan agenda kelembagaan. Kami menemukan program-program inovatif yang dapat dipahami sebagai implementasi moderasi beragama meskipun tidak menggunakan tajuk moderasi beragama. Kami menemukan proses perubahan-perubahan yang berlangsung baik secara struktural maupun kultural yang dapat mendukung realisasi agenda moderasi beragama di lingkungan BSI, PLN, SMAN 53 Jakarta, dan MAN Insan Cendekia Sumatra Barat. Meski demikian, proses perubahan ini tidak terjadi tanpa dinamika. Tarik menarik, resistensi dan negosiasi yang terjadi berpengaruh terhadap keluasan dan kedalaman implementasi moderasi beragama di lingkungan keempat lembaga.

II.2.a. Praktik Moderasi Beragama di BSI

Pada 2021 sejumlah bank syariah, bank-bank swasta yang berafiliasi dengan beberapa bank BUMN, yaitu: BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah bergabung menjadi satu bank bernama Bank Syariah Mandiri (BSI). Bergabungnya tiga lembaga menjadi satu lembaga ini membawa kultur yang berbeda, termasuk yang berkaitan dengan karakter kehidupan keagamaan. Penelitian ini

menemukan bagaimana perbedaan latar belakang ini berpengaruh terhadap proses perubahan di BSI yang memperkuat nilai-nilai yang sejalan dengan moderasi beragama. Dapat dikatakan bahwa peleburan ketiga bank tersebut turut berdampak pada pelemahan pengaruh kekuatan keagamaan yang ekstrem atau intoleran.

Gambaran pengaruh tersebut bisa dilihat paling tidak dalam tiga hal yaitu: penampilan fisik, narasi keagamaan di ruang publik, dan penyaluran dana sosial. Langkah-langkah perubahan yang dilakukan dapat dilihat sebagai kontekstualisasi program moderasi beragama dalam kerangka agenda perusahaan, sehingga pada praktiknya dapat diterima dengan relatif tanpa pergolakan. Kami menemukan beberapa kebijakan penting yang dapat menumbuhkan ekosistem moderasi beragama.

II.2.a.i. Perubahan melalui *Dress Code*

Identifikasi radikalisme melalui bentuk tampilan pakaian seringkali dikritik karena menimbulkan stigma negatif yang tidak selalu mencerminkan realitas, paham dan pengalaman individu yang beragam. Meski demikian, pimpinan BSI mengambil langkah untuk menerapkan *dress code* yang diharapkan dapat menyatukan kultur ketiga perusahaan dengan membuat aturan berbusana yang ternyata tidak hanya berdampak pada kinerja pegawai tetapi juga kultur keagamaan.

Pengaturan mengenai seragam pakaian kerja bagi pegawai BSI ini diatur dengan jelas dan tegas, melalui surat bernomor: No. 01/2516-3/DIR-HCP. Pengaturan ini dibuat tertulis yang lengkap dan visual dengan gambar-gambar yang elegan, profesional dan *stylish* dalam bentuk *booklet* berjudul *Fresh Energi Begin* setebal 49 halaman dengan *layout* dan gambar yang memikat. Dalam *book-*

let ini dijelaskan bahwa seragam korporat BSI dirancang dengan perpaduan konsep digital dengan pergerakan energi yang baru yang mengedepankan kesan modern, universal, keterbukaan, dan inklusif bagi seluruh *stakeholder.*[13]

Gambar 1. Dress Code di BSI

Pada awal merger, pakaian karyawan BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri sangat beragam, termasuk sebagian perempuan menggunakan baju panjang (gamis). Tetapi, setelah ada pengaturan mengenai pakaian ini, mereka harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Seorang pemimpin yang bertanggungjawab di bagian Leadership Academy BSI meyakini bahwa kelompok-kelompok intoleran dan radikal sudah tidak ada di BSI, setidaknya dari sisi tampilan fisik. Ia menyatakan bahwa pada masa-masa awal berdirinya BSI, respons karyawan BSI terhadap inisiatif manajemen tidak semuanya menerima dengan lapang dada. Sebagian karyawan eks-BNI Syariah tidak bisa beradaptasi dengan budaya baru di BSI yang relatif lebih inklusif dan moderat.

14 BSI, booklet "Fresh Energi Begin", Jakarta 2022.

BSI tidak menggunakan istilah melarang jenis pakaian tertentu misalnya, tetapi memberikan ketentuan yang mewajibkan karyawan untuk berpakaian sesuai dengan kebijakan yang diterapkan pihak manajemen. Seorang responden menceritakan pada masa-masa awal berdirinya BSI, respons karyawan BSI terhadap inisiatif manajemen tidak semuanya menerima dengan lapang dada. Karyawan eks-BNI Syariah banyak sekali yang mengundurkan diri karena budaya di BNI Syariah yang sangat kental dengan budaya Islam konservatif tidak bisa beradaptasi dengan budaya baru di BSI yang relatif lebih inklusif dan moderat.

Setelah cukup banyak karyawan BSI eks-BNI Syariah, nyaris tidak ditemukan lagi orang dengan ciri-ciri fisik sebagai muslim konservatif. Apalagi setelah ada pengaturan mengenai penampilan dan cara berpakaian, mereka seolah merasa tidak nyaman dan memilih mengundurkan diri. Dengan keluarnya eks-BNI Syariah, karyawan BSI secara umum relatif seragam dalam soal penerimaan terhadap aturan dan kebijakan yang diterapkan pihak manajemen.

II.2.a.ii. Kultur Moderasi Beragama melalui *Core Values* Perusahaan

Istilah moderasi beragama memang tidak disebutkan secara eksplisit di BSI dalam setiap kegiatan, tetapi nilai-nilai moderasi beragama (komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan ramah budaya lokal) cukup intens ditanamkan di lingkungan BSI, terutama melalui *core values* AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang menjadi jargon Kementerian BUMN. Topik-topik dalam AKHLAK terus digalakkan dalam berbagai kesempatan forum. Ada usaha serius dan

sistematis untuk membuat ekosistem AKHLAK betul-betul membudaya dalam BSI. Sehingga aspek-aspek sektarian dengan sendirinya tersingkir.

Singkatan kata AKHLAK ini sebenarnya bukan *core values* yang hanya diterapkan di BSI, tetapi di BUMN secara umum. Kata serapan bahasa Arab ini sebenarnya memberikan kesan islami, tetapi pada praktiknya justru menumbuhkan kesadaran keagamaan inklusif yang tidak memisahkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keragaman dengan spiritualitas. Yang dilakukan oleh BSI bukanlah meminggirkan kultur keagamaan, tetapi mentranformasikanya menjadi kultur baru yang inklusif dan toleran. Oleh karena internalisasi nilai AKHLAK bagi muslim diterapkan melalui sejumlah kegiatan keagamaan yang rutin seperti doa akhir tahun, *istighotsah, taujih* atau pesan keagamaan setiap Jumat dengan pesan-pesan yang menekankan pada nilai moral yang tidak ekstrem dan menghadirkan wajah agama yang moderat. Untuk memastikan nilai-nilai etik sampai ke pegawai BSI konsisten melakukan *background check* terhadap pakar atau narasumber dari luar yang moderat.

II.2.a.iii. Sentralisasi Manajemen Lembaga Sosial Keagamaan

Tempat ibadah dan kegiatan keagamaan tidak bisa dipungkiri adalah ruang kunci dalam persebaran diskursus keagamaan. Oleh karena itu upaya pencegahan radikalisme banyak terfokus pada analisis atau konten ceramah keagamaan di rumah ibadah. Di BSI kami menemukan upaya ini dilakukan dengan melakukan perubahan struktural atas pengelolaan tempat ibadah termasuk masjid sehingga berada dalam lingkup kebijakan direksi. Pimpinan DKM masjid di BSI saat ini dipegang langsung oleh perwakilan

dari manajemen BSI.

Perubahan manajemen ini memungkinkan BSI melakukan sejumlah langkah kontrol terhadap narasi keagamaan pada kegiatan keagamaan dengan sejumlah cara.

Yang pertama adalah screening dan menerapkan kode etik khatib dan penceramah bekerjasama dengan BNPT.[14] Ketika observasi dilakukan di masjid pada saat salat Jumat, tema khotbah yang diangkat adalah soal kebangsaan, kebhinekaan dan toleransi. Manajemen pengelolaan masjid dilakukan dengan sangat ketat. Yang kedua, BSI membatasi kegiatan keagamaan di luar ruang dan jadwal yang telah disediakan, termasuk menutup akses terhadap tempat ibadah ketika akhir pekan sehingga tidak digunakan untuk kegiatan yang dianggap liar.

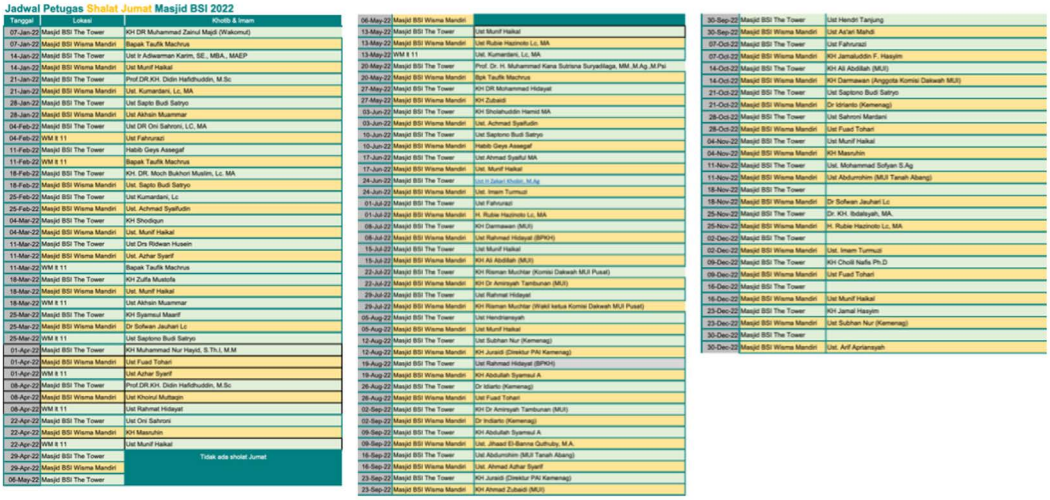

Jadwal Petugas Shalat Jumat Masjid BSI 2022

Tanggal	Lokasi	Khotib & Imam
07-Jan-22	Masjid BSI The Tower	KH DR Muhammad Zainul Majdi (Wakomut)
07-Jan-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Bapak Taufik Machrus
14-Jan-22	Masjid BSI The Tower	Ust Ir Adiwarman Karim, SE., MBA., MAEP
14-Jan-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust Munif Haikal
21-Jan-22	Masjid BSI The Tower	Prof.DR.KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc
21-Jan-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust. Kumardani, Lc, MA
28-Jan-22	Masjid BSI The Tower	Ust Sapto Budi Satryo
28-Jan-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust Akhsin Muammar
04-Feb-22	Masjid BSI The Tower	Ust DR Oni Sahroni, LC, MA
04-Feb-22	WM II 11	Ust Fahrurazi
11-Feb-22	Masjid BSI The Tower	Habib Geys Assegaf
11-Feb-22	WM II 11	Bapak Taufik Machrus
18-Feb-22	Masjid BSI The Tower	KH. DR. Moch Bukhori Muslim, Lc. MA
18-Feb-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust. Sapto Budi Satryo
25-Feb-22	Masjid BSI The Tower	Ust Kumardani, Lc
25-Feb-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust. Achmad Syaifudin
04-Mar-22	Masjid BSI The Tower	KH Shodiqun
04-Mar-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust. Munif Haikal
11-Mar-22	Masjid BSI The Tower	Ust Drs Ridwan Husein
11-Mar-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust. Azhar Syarif
11-Mar-22	WM II 11	Bapak Taufik Machrus
18-Mar-22	Masjid BSI The Tower	KH Zulfa Mustofa
18-Mar-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust. Munif Haikal
18-Mar-22	WM II 11	Ust Akhsin Muammar
25-Mar-22	Masjid BSI The Tower	KH Syamsul Maarif
25-Mar-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Dr Sofwan Jauhari Lc
25-Mar-22	WM II 11	Ust Saptono Budi Satryo
01-Apr-22	Masjid BSI The Tower	KH Muhammad Nur Hayid, S.Th.I, M.M
01-Apr-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust Fuad Tohari
01-Apr-22	WM II 11	Ust Azhar Syarif
08-Apr-22	Masjid BSI The Tower	Prof.DR.KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc
08-Apr-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust Khoirul Muttaqin
08-Apr-23	WM II 11	Ust Rahmat Hidayat
22-Apr-22	Masjid BSI The Tower	Ust Oni Sahroni
22-Apr-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	KH Masruhin
22-Apr-22	WM II 11	Ust Munif Haikal
29-Apr-22	Masjid BSI The Tower	Tidak ada sholat Jumat
29-Apr-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	
06-May-22	Masjid BSI The Tower	
06-May-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	
13-May-22	Masjid BSI The Tower	Ust Munif Haikal
13-May-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust Rubie Hazimoto Lc, MA
13-May-22	WM II 11	Ust. Kumardani, Lc, MA
20-May-22	Masjid BSI The Tower	Prof. Dr. H. Muhammad Kana Sutrisna Suryadilaga, MM..M.Ag..M.Psi
20-May-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Bpk Taufik Machrus
27-May-22	Masjid BSI The Tower	KH DR Mohammad Hidayat
27-May-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	KH Zubaidi
03-Jun-22	Masjid BSI The Tower	KH Sholahuddin Hamid MA
03-Jun-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust. Achmad Syaifudin
10-Jun-22	Masjid BSI The Tower	Ust Saptono Budi Satryo
10-Jun-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Habib Geys Assegaf
17-Jun-22	Masjid BSI The Tower	Ust Ahmad Syaiful MA
17-Jun-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust. Munif Haikal
24-Jun-22	Masjid BSI The Tower	Ust Dr Zaitun Khotbah, M.Ag
24-Jun-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust. Imam Tumbuh
01-Jul-22	Masjid BSI The Tower	Ust Fahrurazi
01-Jul-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	H. Rubie Hazimoto Lc, MA
08-Jul-22	Masjid BSI The Tower	KH Darmawan (MUI)
08-Jul-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust Rahmad Hidayat (BPKH)
15-Jul-22	Masjid BSI The Tower	Ust Munif Haikal
15-Jul-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	KH Ali Abdillah (MUI)
22-Jul-22	Masjid BSI The Tower	KH Risman Muchtar (Komisi Dakwah MUI Pusat)
22-Jul-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	KH Dr Amiroyah Tambunan (MUI)
29-Jul-22	Masjid BSI The Tower	Ust Rahmat Hidayat
29-Jul-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	KH Risman Muchtar (Wakil ketua Komisi Dakwah MUI Pusat)
05-Aug-22	Masjid BSI The Tower	Ust Hendriansyah
05-Aug-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust Munif Haikal
12-Aug-22	Masjid BSI The Tower	Ust Subhan Nur (Kemenag)
12-Aug-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	KH Juraidi (Direktur PAI Kemenag)
19-Aug-22	Masjid BSI The Tower	Ust Rahmad Hidayat (BPKH)
19-Aug-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	KH Abdullah Syamsul A
26-Aug-22	Masjid BSI The Tower	Dr Idarto (Kemenag)
26-Aug-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust Fuad Tohari
02-Sep-22	Masjid BSI The Tower	KH Dr Amiroyah Tambunan (MUI)
02-Sep-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Dr Indarto (Kemenag)
09-Sep-22	Masjid BSI The Tower	KH Abdullah Syamsul A
09-Sep-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust. Jihaad El-Banna Quthuby, M.A.
16-Sep-22	Masjid BSI The Tower	Ust Abdumohim (MUI Tanah Abang)
16-Sep-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust. Ahmad Azhar Syarif
23-Sep-22	Masjid BSI The Tower	KH Juraidi (Direktur PAI Kemenag)
23-Sep-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	KH Ahmad Zubaidi (MUI)
30-Sep-22	Masjid BSI The Tower	Ust Hendri Tanjung
30-Sep-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust Asari Mahdi
07-Oct-22	Masjid BSI The Tower	Ust Fahrurazi
07-Oct-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	KH Jamaluddin F. Hasyim
14-Oct-22	Masjid BSI The Tower	KH Ali Abdillah (MUI)
14-Oct-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	KH Darmawan (Anggota Komisi Dakwah MUI)
21-Oct-22	Masjid BSI The Tower	Ust Saptono Budi Satryo
21-Oct-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Dr Idrianto (Kemenag)
28-Oct-22	Masjid BSI The Tower	Ust Sahroni Mardani
28-Oct-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust Fuad Tohari
04-Nov-22	Masjid BSI The Tower	Ust Munif Haikal
04-Nov-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	KH Masruhin
11-Nov-22	Masjid BSI The Tower	Ust. Mohammad Sofyan S.Ag
11-Nov-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust Abdumohim (MUI Tanah Abang)
18-Nov-22	Masjid BSI The Tower	
18-Nov-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Dr Sofwan Jauhari Lc
25-Nov-22	Masjid BSI The Tower	Dr. KH. Ibdalsyah, MA.
25-Nov-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	H. Rubie Hazimoto Lc, MA
02-Dec-22	Masjid BSI The Tower	
02-Dec-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust. Imam Tumuzi
09-Dec-22	Masjid BSI The Tower	KH Choiil Nafis Ph.D
09-Dec-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust Fuad Tohari
16-Dec-22	Masjid BSI The Tower	
16-Dec-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust Munif Haikal
23-Dec-22	Masjid BSI The Tower	KH Jamal Hasyim
23-Dec-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust Subhan Nur (Kemenag)
30-Dec-22	Masjid BSI The Tower	
30-Dec-22	Masjid BSI Wisma Mandiri	Ust. Arif Apriansyah

Gambar 2. Daftar Khotib di Masjid BSI Tahun 2022

Selain pengelolaan tempat ibadah, implementasi moderasi beragama di BSI juga bisa dilihat dalam penyaluran dana sosial CSR dan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf). Pengelolaan dana sosial keagamaan ini dapat dilihat pada program-program BSI Maslahat. Seorang pimpinan BSI mengakui bahwa donasi

15 Wawancara dengan *Senior Executive Vice President* PLN 24/01/2023.

terhadap Aksi Cepat Tanggap (ACT)—lembaga *fundraising* yang sangat terkenal itu—terjadi sebelum BSI berdiri, atau lebih tepatnya, terjadi ketika masih berupa Bank Mandiri Syariah. M. Quraish Shihab, Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi BeragamaSetelah merger dengan BNI Syariah dan BRI Syariah lalu berubah menjadi BSI, situasi itu sudah berubah. Ekosistem moderasi mulai terbentuk. CSR sebagai lembaga fundraising juga dikelola dengan ketat. Penyaluran dana CSR melalui seleksi yang berjenjang. Jika ada satu lembaga atau komunitas yang meragukan atau tidak diketahui oleh pengelola CSR, mereka akan meminta bantuan BNPT dan PPATK untuk memastikan bahwa penerima manfaat dari CSR bukanlah kelompok intoleran. Kesadaran tentang pentingnya menjaga nilai dalam penyaluran bantuan sosial ini tercermin dalam pernyataan seorang pengelola BSI Maslahat sebagai berikut:

> "Jadi gini, kalau itu bencana susah, Pak. Biasanya langsung kita bantu. Tapi kalau pesantren misalnya kita cek dulu ke BNPT dan PPATK. Jadi di sana ada daftar terduga teroris atau tidak. Jika di sana aman, kita lihat juga di lapangan seperti apa. Kita juga cek ke lokasi."

Meski demikian, ketentuan tentang kriteria penerima BSI Maslahat masih bersifat umum. Kesadaran tentang pentingnya mencegah penyaluran dana BSI Maslahat ke organisasi ekstrem belum tercermin, sebagaimana terlihat dalam kriteria penerima bantuan berikut:

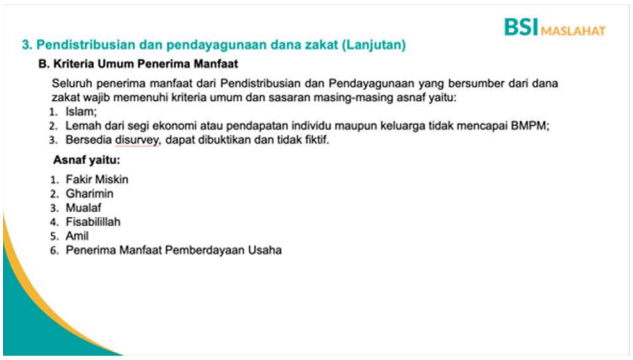

BSI MASLAHAT

3. Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat (Lanjutan)

B. Kriteria Umum Penerima Manfaat

Seluruh penerima manfaat dari Pendistribusian dan Pendayagunaan yang bersumber dari dana zakat wajib memenuhi kriteria umum dan sasaran masing-masing asnaf yaitu:

1. Islam;
2. Lemah dari segi ekonomi atau pendapatan individu maupun keluarga tidak mencapai BMPM;
3. Bersedia disurvey, dapat dibuktikan dan tidak fiktif.

Asnaf yaitu:

1. Fakir Miskin
2. Gharimin
3. Mualaf
4. Fisabilillah
5. Amil
6. Penerima Manfaat Pemberdayaan Usaha

PENYALURAN DANA CSR, DANA ZAKAT INFAK DAN SODAKOH BSI MASLAHAT TAHUN 2022 (dalam milyar rupiah)

1.	Pemberdayaan Desa	23.3
2.	Pemberdayaan UMKM	20.8
3.	Pemberdayaan Pesantren	4.3
4.	Bantuan Beasiswa	31.4
5.	Bantuan Pelayanan Kesehatan	2.1
6.	Bantuan Kemanusiaan	45.1
7.	Bantuan Kebencanaan	3.8
8.	Bantuan Kurban	10.8
9.	Pembangunan Mesjid	33.0
	Total	**174.6**

Gambar 3. Kriteria dan daftar penerima penyaluran dana BSI Maslahat Tahun 2022

II.2. b. Praktik Moderasi Beragama di PLN

Sebagaimana pengalaman BSI, di PLN tidak diselenggarakan agenda khusus untuk membangun moderasi beragama. Topik mengenai moderasi beragama juga sangat jarang dibahas dalam forum-forum formal maupun informal. Seorang pegawai CSR PLN menegaskan tidak ada regulasi yang eksplisit mengenai moderasi beragama. "Tetapi kalau imbauan pimpinan atau manajemen kita yang beragama agar saling bertoleransi tidak mengarah ke agama yang radikal, itu ada. Cuma itu tidak dalam kebijakan," ujarnya.[15]

Seorang *Executive Vice President* PLN menegaskan bahwa PLN tak ubahnya seperti Indonesia mini, orang-orangnya sangat majemuk, baik dari segi etnis, budaya maupun agama. Semua keyakinan agama di PLN diberi ruang ekspresi. Peluang karier laki-laki dan perempuan juga mendapat perhatian yang sama, termasuk bagi kalangan yang beragam latar belakang. Ada satu orang karyawan non-muslim yang merasa kariernya kurang mulus dibanding dari karyawan muslim. Tapi, ini dibantah dengan keras oleh seorang *Executive Vice President*. "Saya Katolik, bisa tuh karier saya sampai vice president," kata seorang *Executive Vice President*.[16] Khusus bagi perempuan, karier perempuan bahkan mendapat perhatian khusus, di mana hampir

16 Wawancara pegawai CSR PLN, 27 Januari 2023.
17 Wawancara seorang Executive Vice President PLN, 25 Januari 2023.

semua posisi, perempuan selalu mendapat porsi yang layak.

Manajemen PLN bahkan cenderung menghindari untuk membahas tema-tema lintas agama. “Kalau perusahaan nggak terlalu ikut campur dalam hal itu. Itu kan sensitif. Karena di internal kan normal-normal saja. Maksudnya sudah berjalan harmonis saling memahami. Jadi, nggak perlu ada media buat itu. Karena memang itu kan di ranah keyakinan masing-masing yang notabene nggak bisa juga kita samakan frekuensinya. Kita nggak bisa memaksakan juga harus sama frekuensinya,” ujarnya.

Praktik moderasi beragama di PLN, baik secara eksplisit atau implisit, tidak bisa dilepaskan dari peran kunci pemimpin PLN. Kepemimpinan yang inklusif dalam sosok seorang *Executive Vice President* yang berpengalaman memimpin di lingkungan mayoritas muslim dan non-muslim menghadirkan sensitivitas untuk tumbuhnya sikap toleran di bidang agama. Seorang pemimpin PLN mengakui ada semacam stigma bahwa PLN dulu sarangnya kelompok-kelompok konservatif. Ketika dia masuk PLN dan diangkat menjadi sekretaris perusahaan delapan bulan yang lalu, ia mengklaim bahwa “...kondisi di dalam tidak seheboh yang ada di stigma tersebut. Cuma BOD-nya (*board of directors*) lebih banyak ngomong soal kerjaan 24 jam, kita tidak pernah membahas soal itu. Sehingga tidak ada ruang ngobrolin hal-hal kaya’ begitu.”

Upaya perubahan yang sejalan dengan agenda moderasi beragama di PLN dapat dilihat dalam beberapa pola di bawah ini.

II.2.b.i. Restrukturisasi Pengelolaan Ruang Keagamaan

Upaya pencegahan radikalisme melalui ruang keagamaan di PLN ditandai oleh kerjasama dengan BNPT pada tahun 2016. “PLN memerlukan dukungan dari BNPT sebagai upaya melindungi aset

PLN baik aset berupa fisik maupun aset human capital," tutur Direktur Utama PLN waktu itu, Zulkifli Zaini. Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh Kepala BNPT, Boy Rafli Amar dan Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, 16 November 2016.

Kerjasama ini berkaitan dengan proses perubahan struktural dan kultural kegiatan keagamaan di lingkungan PLN. Kegiatan keagamaan dan kegiatan karyawan lainnya diwadahi dalam BKK (Badan Kesejahteraan Karyawan). Kegiatan kerohanian Islam dikoordinir oleh seseorang yang diangkat oleh direksi. Begitu pun pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) PLN diangkat oleh Badan Pembina Kerohanian Islam (BAPEKIS) BKK. Karenanya, pengurus DKM PLN bertanggungjawab kepada BAPEKIS yang mengangkatnya. BAPEKIS menekankan keberagamaan yang rahmatan lilalamin kepada pengurus DKM. Untuk mewujudkan Islam rahmatan lilalamin di masjid PLN, pengurus DKM Masjid At-Taqwa PLN membuat Kode Etik Penceramah yang harus ditaati oleh semua khatib Jumat dan penceramah di kajian rutin DKM Masjid At-Taqwa PLN. Kode etik ceramah ini berlaku pada tahun 2018. Kode etik penceramah di Masjid At-Taqwa PLN berbunyi:

PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
DEWAN KEMAKMURAN MASJID AT-TAQWA
Sekretariat : Jl. Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp: 021-7398988. Exc. 1630 e-mail: attaqwa@pln.co.id

KODE ETIK PENCERAMAH

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

"Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh Alam" (QS. Al Anbiya : 107)

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم و اتقوا الله لعلكم ترحمون

"Sesungguhnya Orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat" (QS. Al Hujurat : 10)

Demi menjaga suasana tetap kondusif dalam bingkai ukhwah Islamiyah, maka dipandang perlu membuat kode etik bagi penceramah di masjid At-Taqwa PLN Kantor Pusat sebagai berikut:

1. Tidak boleh menyinggung Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
2. Tidak boleh menyinggung politik praktis (kampanye partai, kampanye kepala daerah/presiden).
3. Tidak boleh ghibah.
4. Tidak boleh menyinggung tema yang berpotensi menimbulkan pertentangan mazhab, ormas, gerakan dan aliran.

Penceramah harus mengedepankan:

1. Ukhwah Islamiyah.
2. Islam sebagai rahmatan lil'alamin.
3. Islam sebagai perekat ummat.
4. Islam sebagai tuntunan hidup yang mulia bagi seluruh ummat manusia.

Jakarta, 22 Mei 2018

Pengurus DKM At-Taqwa PLN Kantor Pusat

Ketua Umum

Gambar 4. Kode Etik Penceramah PLN. 17

Menurut Ustaz Al-Jupri, manager pelaksana harian peribadatan masjid PLN, kode etik yang dibuat DKM cukup membantu penceramah menyusun narasi khotbah di dalam koridor apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. “Mereka gak boleh menyinggung masalah SARA, kelompok. Itu udah kita buatkan dan bingkai. Dan kita selalu infokan ke penceramah kita. Anda boleh ceramah, mengisi materi tetapi gak boleh menyinggung ini, gak boleh menyinggung politik, gak boleh menyinggung suku, agama, golongan yang lain,” ujarnya.[18]

18 Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa PLN Kantor Pusat, Kode Etik Penceramah, 22 Mei 2018.
19 Wawancara manajer DKM Masjid PLN, 20/01/2023.

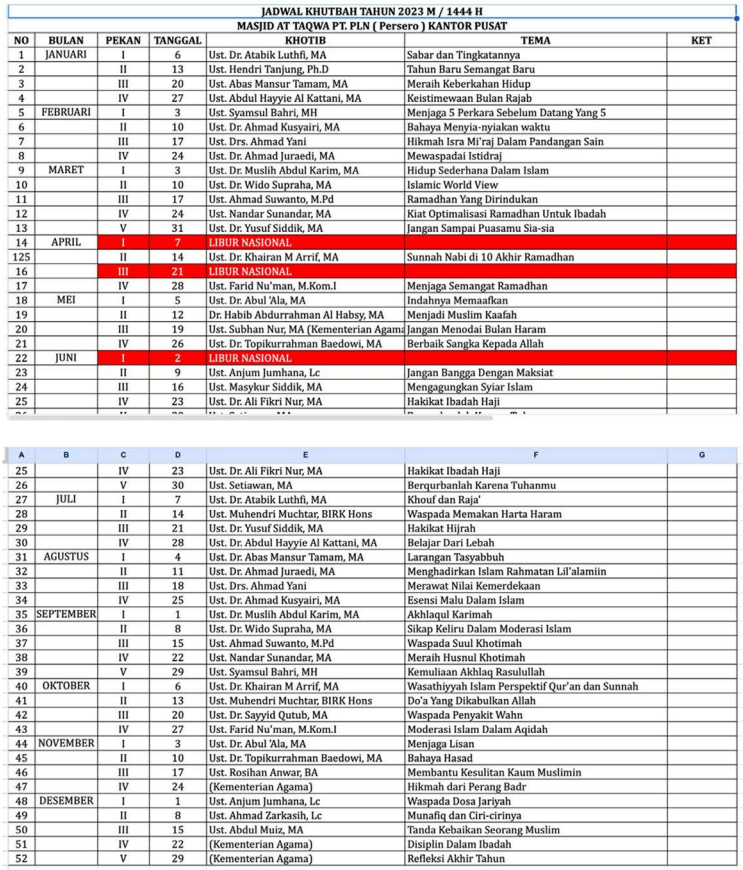

JADWAL KHUTBAH TAHUN 2023 M / 1444 H
MASJID AT TAQWA PT. PLN (Persero) KANTOR PUSAT

NO	BULAN	PEKAN	TANGGAL	KHOTIB	TEMA	KET
1	JANUARI	I	6	Ust. Dr. Atabik Luthfi, MA	Sabar dan Tingkatannya	
2		II	13	Ust. Hendri Tanjung, Ph.D	Tahun Baru Semangat Baru	
3		III	20	Ust. Abas Mansur Tamam, MA	Meraih Keberkahan Hidup	
4		IV	27	Ust. Abdul Hayyie Al Kattani, MA	Keistimewaan Bulan Rajab	
5	FEBRUARI	I	3	Ust. Syamsul Bahri, MH	Menjaga 5 Perkara Sebelum Datang Yang 5	
6		II	10	Ust. Dr. Ahmad Kusyairi, MA	Bahaya Menyia-nyiakan waktu	
7		III	17	Ust. Drs. Ahmad Yani	Hikmah Isra Mi'raj Dalam Pandangan Sain	
8		IV	24	Ust. Dr. Ahmad Juraedi, MA	Mewaspadai Istidraj	
9	MARET	I	3	Ust. Dr. Muslih Abdul Karim, MA	Hidup Sederhana Dalam Islam	
10		II	10	Ust. Dr. Wido Supraha, MA	Islamic World View	
11		III	17	Ust. Ahmad Suwanto, M.Pd	Ramadhan Yang Dirindukan	
12		IV	24	Ust. Nandar Sunandar, MA	Kiat Optimalisasi Ramadhan Untuk Ibadah	
13		V	31	Ust. Dr. Yusuf Siddik, MA	Jangan Sampai Puasamu Sia-sia	
14	APRIL	I	7	LIBUR NASIONAL		
125		II	14	Ust. Dr. Khairan M Arrif, MA	Sunnah Nabi di 10 Akhir Ramadhan	
16		III	21	LIBUR NASIONAL		
17		IV	28	Ust. Farid Nu'man, M.Kom.I	Menjaga Semangat Ramadhan	
18	MEI	I	5	Ust. Dr. Abul 'Ala, MA	Indahnya Memaafkan	
19		II	12	Dr. Habib Abdurrahman Al Habsy, MA	Menjadi Muslim Kaafah	
20		III	19	Ust. Subhan Nur, MA (Kementerian Agama	Jangan Menodai Bulan Haram	
21		IV	26	Ust. Dr. Topikurrahman Baedowi, MA	Berbaik Sangka Kepada Allah	
22	JUNI	I	2	LIBUR NASIONAL		
23		II	9	Ust. Anjum Jumhana, Lc	Jangan Bangga Dengan Maksiat	
24		III	16	Ust. Masykur Siddik, MA	Mengagungkan Syiar Islam	
25		IV	23	Ust. Dr. Ali Fikri Nur, MA	Hakikat Ibadah Haji	

A	B	C	D	E	F	G
25		IV	23	Ust. Dr. Ali Fikri Nur, MA	Hakikat Ibadah Haji	
26		V	30	Ust. Setiawan, MA	Berqurbanlah Karena Tuhanmu	
27	JULI	I	7	Ust. Dr. Atabik Luthfi, MA	Khouf dan Raja'	
28		II	14	Ust. Muhendri Muchtar, BIRK Hons	Waspada Memakan Harta Haram	
29		III	21	Ust. Dr. Yusuf Siddik, MA	Hakikat Hijrah	
30		IV	28	Ust. Dr. Abdul Hayyie Al Kattani, MA	Belajar Dari Lebah	
31	AGUSTUS	I	4	Ust. Dr. Abas Mansur Tamam, MA	Larangan Tasyabbuh	
32		II	11	Ust. Dr. Ahmad Juraedi, MA	Menghadirkan Islam Rahmatan Lil'alamiin	
33		III	18	Ust. Drs. Ahmad Yani	Merawat Nilai Kemerdekaan	
34		IV	25	Ust. Dr. Ahmad Kusyairi, MA	Esensi Malu Dalam Islam	
35	SEPTEMBER	I	1	Ust. Dr. Muslih Abdul Karim, MA	Akhlaqul Karimah	
36		II	8	Ust. Dr. Wido Supraha, MA	Sikap Keliru Dalam Moderasi Islam	
37		III	15	Ust. Ahmad Suwanto, M.Pd	Waspada Suul Khotimah	
38		IV	22	Ust. Nandar Sunandar, MA	Meraih Husnul Khotimah	
39		V	29	Ust. Syamsul Bahri, MH	Kemuliaan Akhlaq Rasulullah	
40	OKTOBER	I	6	Ust. Dr. Khairan M Arrif, MA	Wasathiyyah Islam Perspektif Qur'an dan Sunnah	
41		II	13	Ust. Muhendri Muchtar, BIRK Hons	Do'a Yang Dikabulkan Allah	
42		III	20	Ust. Dr. Sayyid Qutub, MA	Waspada Penyakit Wahn	
43		IV	27	Ust. Farid Nu'man, M.Kom.I	Moderasi Islam Dalam Aqidah	
44	NOVEMBER	I	3	Ust. Dr. Abul 'Ala, MA	Menjaga Lisan	
45		II	10	Ust. Dr. Topikurrahman Baedowi, MA	Bahaya Hasad	
46		III	17	Ust. Rosihan Anwar, BA	Membantu Kesulitan Kaum Muslimin	
47		IV	24	(Kementerian Agama)	Hikmah dari Perang Badr	
48	DESEMBER	I	1	Ust. Anjum Jumhana, Lc	Waspada Dosa Jariyah	
49		II	8	Ust. Ahmad Zarkasih, Lc	Munafiq dan Ciri-cirinya	
50		III	15	Ust. Abdul Muiz, MA	Tanda Kebaikan Seorang Muslim	
51		IV	22	(Kementerian Agama)	Disiplin Dalam Ibadah	
52		V	29	(Kementerian Agama)	Refleksi Akhir Tahun	

Gambar 5. Daftar Penceramah Masjid PLN Tahun 2023

Program yang secara eksplisit menggunakan tajuk moderasi beragama bukan tidak terjadi sama sekali. Selain kerjasama dengan BNPT, DKM Masjid At-Taqwa PLN juga bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam bentuk pelatihan, *workshop* tentang moderasi beragama.

Dampak dari perubahan kebijakan terkait pengelolaan kegiatan keagamaan diakui oleh seorang jemaah yang merasakan konten-konten ceramah di masjid PLN menjadi lebih normatif. Ia menceritakan:

> "Kalau kita lihat yang pertama, kalau dari konten isi materi itu bisa dikendalikan. Kita bisa mengontrol materi-materi yang perlu disampaikan oleh penceramah. Kemudian yang kedua, jadi gak menimbulkan kebingungan di jamaah. Jamaah juga jadi paham, jelas. Makanya, akhirnya seperti kajian-kajian pun, kita lebih muatannya normatif."[19]

20 Wawancara manajer DKM Masjid PLN, 20 Januari 2023.

II.2.b.ii. *Core Values, Ranger*, dan Kultur Inklusif

Sebagaimana BUMN, budaya kerja di PLN mengacu pada *core values* AKHLAK. Penerapan nilai-nilai budaya kerja perusahaan ini membentuk ekosistem dan kultur yang dapat menumbuhkan nilai moderasi beragama. Salah satu yang membentuk praktik inklusif dalam budaya kehidupan keagamaan adalah kesadaran tentang PLN sebagai rumah bersama, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang responden:

> "Kalau saat bekerja, saya kira itu sudah merupakan rumah bersama ya, karena kita sudah tidak lagi melihat agamanya. Halal bi halal, itu tidak hanya muslim saja, tapi semuanya. Semua event PLN itu adalah event bersama. Saya pribadi merasa nyaman, semuanya diberi kesempatan dan toleransinya cukup terasa."[20]

Executive Vice President yang beragama Kristen membuat budaya mengucapkan "Selamat Natal" di PLN bukanlah hal yang tabu. Ia juga menjaga nilai non-diskriminasi dalam kebijakan promosi. Dirut PLN menyatakan bahwa "...pengembangan karier pegawai pun tidak ada pembedaan dalam hal agama, suku. Yang berprestasi naik. Saya orang Katolik jadi *Executive Vice President* (EVP) di bawah direksi." Lebih lanjut ia bercerita, "Saat Natal, saya sering mendapatkan ucapan 'Selamat berbahagia bersama keluarga di hari spesial, Mas'. Itulah toleransi beragama."

Budaya inklusif ini tumbuh dari kebijakan kelembagaan yang menerapkan pengawasan berjenjang, coaching dan mentoring terhadap pegawai baru oleh agen-agen perubahan yang kadang juga disebut ranger. Tugas para ranger ini adalah melakukan *briefing* rutin dan mentoring terhadap para pegawai agar konsisten dalam menerapkan *core values* AKHLAK. Hal ini

21 Wawancara manajer CSR PLN, 20 Januari 2023.

berlaku tidak hanya di kantor PLN pusat tetapi juga di semua unit di Indonesia.

Seorang responden tidak memungkiri bahwa di PLN ada pegawai yang berasal dari kalangan Wahabi atau Salafi yang tidak membolehkan mengucapkan selamat hari raya bagi agama lain. Ada juga yang tidak mau mengucapkan selamat ulang tahun. Meski demikian, karena berkaitan dengan keyakinan hal ini tidak dipermasalahkan. Justru kultur inklusif demikian memberi ruang kepada mereka untuk tetap menjaga relasi sosial dengan redaksi ucapan yang berbeda. Ada yang tidak mengucapkan selamat ulang tahun, tetapi mengucapkan "Semoga Anda sehat selalu dan sukses".

II.2.b.iii. Pengelolaan Dana Sosial dan Keagamaan

Dana sosial PLN disalurkan melalui dua lembaga yaitu CSR perusahaan melalui lembaga bernama TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) dan dana zakat, infak, sedekah yang dikumpulkan dari pegawai muslim disalurkan melalui Yayasan Baitul Mal (YBM) PLN. Berbeda dengan dana CSR yang secara langsung dikelola oleh perusahaan, YBM PLN berada di luar PLN tetapi diberi kewenangan untuk mengelola infak, sedekah, dan zakat dari karyawan PLN. Penghasilan (gaji, bonus) karyawan PLN yang muslim dipotong secara otomatis dari *payroll* karyawan sebanyak 2,5%. Pemotongan ini berdasarkan PERDIR No. 012.P/DIR/2015 kemudian dilanjutkan dengan PERDIR No. 120.P/DIR/2017 tentang pemotongan zakat penghasilan dan penghimpunan infak, sedekah, dan wakaf pegawai muslim secara terpusat melalui Yayasan Baitul Maal. PENDIR ini menjadi dasar hukum bagi YBM untuk melakukan pemungutan dana ZISWAF

pada karyawan PLN yang muslim.

Jumlah penghimpunan zakat *payroll* YBM PLN tahun 2021 adalah sebesar **Rp 242 Miliar** atau mengalami peningkatan sebesar **8,3 Miliar (3,5%)** dibanding jumlah penghimpunan zakat *payroll* periode tahun 2020. Perbandingan jumlah penghimpunan zakat *payroll* YBM PLN tahun 2020 dan 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

Zakat Payroll	Penghimpunan Juta (Rp)		Kenaikan	
	2020	2021	Rp	%
Triwulan I	29.898,0	31.284,2	8.297,6	3,5
Triwulan II	63.609,4	68.171,4		
Triwulan III	42.725,2	84.175,8		
Triwulan IV	97.662,0	58.560,9		
Total	233.894,5	242.192,3		

Penghimpunan Zakat non Payroll

Zakat *non payroll* merupakan penerimaan zakat dari karyawan PLN yang secara sukarela menunaikan zakat langsung ke YBM PLN di luar pemotongan penghasilan melalui *payroll*. Jumlah penghimpunan zakat *non payroll* YBM PLN tahun 2021 adalah sebesar **Rp 1,28 Miliar** atau mengalami kenaikan sebesar **Rp 96,2 juta (8,1%)** dibanding jumlah penghimpunan zakat *non payroll* periode yang sama pada tahun 2020. Perbandingan jumlah penghimpunan zakat *non payroll* YBM PLN tahun 2020 dan 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

Zakat non Payroll	Penghimpunan Juta (Rp)	Kenaikan
		%

Gambar 6. Perbandingan Dana Zakat Payroll dan Non-Payroll YBM PLN Tahun 2020 dan 2021[21]

Dari kedua sumber ini terlihat besarnya dana sosial yang dapat disalurkan melalui PLN. Data pada tahun 2021 menunjukkan dana yang terkumpul melalui TJSL sebesar Rp835,83 miliar dan Rp261 Miliar di YBM PLN.[22] Ini adalah jumlah yang sangat besar, artinya dari PLN setiap tahun terkumpul dana sosial lebih dari 1 triliun rupiah. Para responden dari pimpinan PLN yang kami wawancara mengklaim bahwa ada upaya untuk mencegah penyaluran dana kepada atau melalui kelompok-kelompok radikal atau ekstrem. Menurut para pengelolanya, TJSL dikelola cukup baik dan cenderung menghindari isu-isu sensitif, termasuk isu yang berseberangan dengan moderasi beragama. Meski tidak ada program khusus mengenai moderasi beragama, para pengelola CSR mengaku bisa menjamin bahwa penerima manfaat TJSL bukan kelompok-kelompok ekstrem. Sayangnya, laporan detail mengenai ini tidak diberikan. Oleh karena itu, diperlukan

22 YBM PLN, Laporan Tahunan 2021, hal. 14.
23 Lihat Laporan Keberlanjutan PLN 2021, hal. 42 dan Laporan Tahunan YBM PLN 2021, hal. 10.

telaah lebih lanjut mengenai sejauh mana kebijakan penyaluran dana sosial dan keagamaan PLN dapat terhindar dari kemitraan dengan kelompok-kelompok yang mengusung ideologi radikal dan ekstrem.

Penelusuran kami secara daring melalui kata kunci YBM PLN dengan sejumlah organisasi kemanusiaan Islam yang cukup dikenal menunjukkan keragaman mitra YBM PLN. Pada 2021, masih ditemukan kemitraan YBM PLN dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang ditengarai terkait dengan tindakan penggelapan dana dan hubungan dengan kelompok ekstrem.[23] Dengan kasus korupsi di tubuh ACT yang berujung pada penghentian izin operasional ACT, mestinya kemitraan YBM PLN dengan ACT tidak berlanjut setelah itu. Meski demikian, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran, atau paling tidak pengetahuan, tentang organisasi kemanusiaan yang mempunyai ideologi radikal belum ada paling tidak pada dua tahun yang lalu. Lembaga kemanusiaan lain yang kami temukan mempunyai kerjasama dengan YBM PLN di antaranya adalah Rumah Zakat,[24] Dompet Dhu'afa,[25] LAZISNU,[26] LAZISMU,[27] dan BAZNAS.[28] Informasi penyaluran melalui lembaga-lembaga ini tercatat dalam kurun tahun 2021-2023.

Pengakuan pengelola TJSL bahwa kebijakan yang mereka anut menghindari isu-isu sensitif perlu dilihat penerjemahannya dalam praktik pemilihan mitra dan penetapan penerima bantuan. Sejauh penelitian ini, tidak ada SOP yang secara eksplisit memberikan prinsip atau panduan pencegahan ekstremisme

24 https://sumbar.antaranews.com/berita/431174/bekerjasama-dengan-act-ybm-pln-bukittinggi-salurkan-bantuan-ini-pada-kaum-dhuafa
25 https://www.rumahzakat.org/id/ybm-pln-updk-pekanbaru-melalui-rumah-zakat-menyalurkan-183-beasiswa
26 https://ybmpln.org/Kabar/detail/3403/ybm-pln-uiw-papua-dan-papua-barat-bekerja-sama-dengan-dompet-dhuafa-adakan-khitan-massal/3
27 https://seputarindonesia.co.id/2023/02/14/pcnu-dan-ybm-pln-unit-up3-mojokerto-bantu-korban-banjir-desa-pungging/
28 https://lazismu.org/view/gandeng-ybm-pln-lazismu-tingkatkan-ekonomi-di-tengah-pandemi
29 https://ybmpln.org/Kabar/detail/3827/ybm-pln-up3-mojokerto-kolaborasi-dengan-baznas-jombang-gelar-khitan-massal-di-kecamatan-mojoagung/4

dalam pengelolaan dana bantuan sosial dan keagamaan.

II.2.c. Praktik Moderasi Beragama di SMAN 53 Jakarta

Pemaparan temuan tentang narasi penerimaan moderasi beragama di bagian sebelumnya menunjukkan dua pola penerimaan, yaitu penerimaan afirmatif dan penerimaan kritis (disertai kewaspadaan). Di lingkungan dua sekolah yang menjadi lokasi penelitian ini, penerimaan afirmatif lebih jelas terlihat di SMAN 53 Jakarta, sementara penerimaan kritis bisa ditemukan di MAN Insan Cendekia Sumatra Barat. Penerimaan kritis dapat diilustrasikan oleh pendidik atau peserta didik yang memiliki respons positif tentang moderasi, kerukunan, keragaman agama tapi mereka masih menekankan toleransi itu boleh dilakukan hanya sebatas mu'amalah atau hubungan sosial saja. Ada sikap kekhawatiran atau kewaspadaan tentang kemungkinan moderasi beragama dapat menjauhkan seseorang dari keyakinan agama. Contoh, pendangkalan akidah yang dimaksud bisa dalam bentuk mendoakan non-muslim yang terkena musibah, mengucapkan natal, dan sebagainya.

Meski demikian, kedua sekolah tersebut menunjukkan sejumlah praktik baik pendidikan yang dapat mendukung agenda moderasi beragama. Pemaparan di bawah ini menunjukkan bagaimana narasi penerimaan, baik yang afirmatif maupun kritis, terwujud dalam ranah praktis di lapangan. Pendidikan adalah sesuatu yang praktikal, di mana gagasan dan idealisme terkadang harus bernegosiasi dengan realitas lapangan yang beragam. Dari temuan ini diharapkan tergambar bagaimana agenda moderasi beragama beresonansi dengan dinamika dan perubahan yang berlangsung di lembaga pendidikan negeri dan keagamaan, baik secara struktural

maupun kultural.

SMA Negeri 53 Jakarta awalnya merupakan kelas jauh (filial) dari SMA 14 Cililitan Jakarta Timur. Kemudian berdasarkan SK. Mendikbud nomor 0220/0/1981, ditetapkan menjadi SMA Negeri 53 Jakarta dan peresmiannya tanggal 27 Maret 1982. SMA Negeri 53 Jakarta memiliki sejumlah guru tetap, guru honorer, sampai dengan guru dari lembaga bimbingan belajar untuk program pendalaman materi yang semuanya kurang lebih berjumlah 70 orang. Staf dan karyawan yang dimiliki SMA Negeri 53 Jakarta kurang lebih berjumlah 20 orang.

Visi SMAN 53 Jakarta sebagaimana yang tersaji dalam website-nya adalah: Unggul dalam Prestasi Akademik, Non-Akademik, Berakhlak Mulia, Kompetitif di Era Global berdasarkan Iman dan Taqwa. Sementara misinya adalah:

1) Menanamkan nilai keagamaan dan moral.
2) Melaksanakan KBM dengan efektif.
3) Meningkatkan disiplin semua warga sekolah.
4) Meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan.
5) Menumbuhkan semangat berprestasi kepada seluruh warga sekolah; dan
6) Meningkatkan daya saing untuk mencapai prestasi.

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang digunakan oleh SMAN 53 Jakarta mengacu pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 saat ini diterapkan bagi siswa-siswi yang saat ini berada di kelas XI dan XII. Dan bagi siswa kelas X diterapkan Kurikulum Merdeka. Mengingat bahwa sejak tahun 2022, SMAN 53 Jakarta ditunjuk oleh Polda Metro Jaya sebagai salah satu sekolah percontohan untuk Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5),

maka Kurikulum Merdeka yang memuat materi-materi terkait P5 itulah yang saat ini diterapkan. Bisa dikatakan, bahwa dalam konteks sekolah menengah tingkat atas ini, moderasi beragama diterapkan di dalam kegiatan P5 Kurikulum Merdeka. Kegiatan P5 ini dilaksanakan melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan melibatkan guru-guru dari berbagai bidang studi, tidak hanya guru agama dan guru PPKN untuk mengawal dan menjadi fasilitator dari pelaksanaan P5. Meskipun secara umum, pengenalan mengenai membangun sikap moderat dalam beragama, menghargai kemajemukan, membangun toleransi, lebih banyak diintegrasikan dalam pelajaran agama maupun PPKN.[29] Untuk kelas XI dan XII yang tidak menggunakan kurikulum P5, kebanyakan pembahasan ini diintegrasikan pada mata pelajaran agama dan PPKN; serta pendampingan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan antara lain oleh ROHIS, ROHKRIS, dan ROHKAT; yang tidak hanya diserahkan kepada para siswa namun juga mendapatkan supervisi dari guru pembina atau guru pendamping yang ditugaskan; yang kebanyakan adalah guru pelajaran pendidikan agama dari berbagai agama yang dianut siswa di sekolah tersebut.[30]

Selain sebagai salah satu sekolah percontohan untuk Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), SMAN 53 Jakarta juga mempunyai program Sekolah Ramah Anak yang diinisiasi oleh AGPAII (Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia). Program ini dilihat dari tiga indikator, yaitu: a) budaya kelas, b) budaya sekolah, dan c) ekstrakurikuler (kegiatan siswa). Budaya kelas sangat terkait dengan interaksi antara guru dan siswa, bagaimana guru me-manage kelas dan menanamkan nilai-nilai apa pun itu. Budaya sekolah terkait dengan kebijakan sekolah, yakni bagaimana agar kepala sekolah

30 Sebagaimana keterangan dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru pendamping ROHIS, dan ROKHAT, 31 Januari 2023.

31 Wawancara dengan guru pendamping ROHIS dan ROHKAT, 4 Februari 2023.

mendukung sekolah yang ramah anak. Ekstrakurikuler, dalam hal ini ROHIS, sangat berpengaruh karena sebagai wadah aktivitas siswa untuk memperdalam agamanya di bawah pembinaan guru agamanya. Problem terjadi manakala banyak kegiatan ROHIS tidak diperhatikan oleh guru agamanya; sehingga aktivitas ROHIS banyak dipegang guru-guru lain dan cenderung mengundang berbagai pihak dari luar termasuk di dalamnya alumninya sendiri.[31] Namun, dalam konteks SMAN 53 Jakarta, ROHIS secara intensif dibina oleh guru PAI (yang kebetulan merupakan salah satu pengurus DPP AGPAII). Sehingga, meskipun para siswa diberikan ruang untuk bisa menyampaikan materi kepada sesama rekannya, guru PAI tetap memiliki kontrol terhadap apa yang hendak disampaikan oleh pengurus ROHIS kepada rekan-rekannya.

> "Makanya kalau ada acara, misalnya acara kerohanian ROHIS Putri, lalu dia googling dan buat PPT, saya selalu bilang sebelum disampaikan kirim ke saya dulu, ya, PPT-nya. Tema ini jangan, ya. Kamu ngaji saja belum bisa, yang ini nggak usah. Direject dulu. Saya sudah sampaikan begitu ke anak-anak. Dia sudah bisa baca Al-Quran, bisa lagu MTQ, bisa baca lancar itu sudah bagus. Kamu jangan yang aneh-aneh. Kalau saat dia ikut tahsin, kadang dia pakai jilbab, nanti dilepas lagi. Kalau hari Senin itu, bisa dilihat. Anak-anak yang muslim ada yang pakai jilbab dan ada yang tidak." (AM, Guru PAI)[32]

Kegiatan-kegiatan kesiswaan di SMAN 53 Jakarta cukup banyak, antara lain: OSIS,[33] Kerohanian (ROHIS, ROHKRIS, dan ROHKAT).[34] Kegiatan kesiswaan lain yang cukup besar antara lain pentas seni dan reuni akbar. Sementara itu, juga terdapat berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Yang menurut wakil kepala sekolah

32 Keterangan dari hasil wawancara dengan Guru PAI, 24 Januari 2023.
33 Wawancara wakil kepala sekolah 2 bidang sarprashum yang juga Guru PAI senior di SMA 53 Jakarta, 30 Januari 2023.
34 OSIS di bawah pembinaan langsung wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, begitu pula Majelis Perwakilan Kelas (MPK).
35 Pembina ROHIS yang juga sekaligus guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan untuk keputriannya guru PPKN, pembina ROHKRIS guru Pendidikan Agama Kristen (PAK), dan pembina ROHKAT guru Agama Katholik.

bidang sarana prasarana dan humas (sarprashum) merupakan jumlah ekstrakurikuler terbanyak untuk SMA di Jakarta.[35] Senada dengan beliau, Ketua Komite Sekolah SMAN 53 Jakarta, beliau juga mengamini bahwa SMAN 53 ini adalah SMA dengan kegiatan ekstrakurikuler terbanyak, meskipun menyebutkan jumlah yang berbeda.[36] Sekadar untuk menyebut contohnya, sebagaimana dikutip dari salah satu laman *website*, kegiatan ekstrakurikuler siswa SMAN 53 antara lain: teater [Kumantelaga], Rohani Islam (Rohis), Rohani Kristen (Rohkris), Paskibra (KI-PKBR), Palang Merah Remaja (PMR), majalah dinding (Mading), paduan suara [ZEMEFIT], basket [FTB], futsal, taekwondo, pencak silat, English Club (EC), pramuka [Enscovity Scout], Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), ICT Club, seni tari (tari saman) [Sancety], dan marching band.

Dari berbagai kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler ini, cukup banyak prestasi yang ditorehkan dan acapkali masuk dalam media pemberitaan. Di antaranya adalah: pada 2022, salah satu murid SMAN 53 Jakarta terpilih menjadi salah satu pasukan pengibar bendera merah putih atau paskibra yang bertugas pada upacara 17 Agustus di Balaikota Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, juga banyak siswa berprestasi di bidang lainnya antara lain: di bidang olahraga, pramuka, seni, dan lain sebagainya. Antara lain, terkait olahraga, prestasi SMAN 53 terdapat pada cabang atletik yang diselenggarakan oleh UNJ maupun dalam cabang olahraga polo air dalam kejuaraan polo air tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kemenpora. Di bidang seni, sekolah ini pernah memenangkan juara lomba tari saman tingkat nasional pada masa pemerintahan Presiden SBY.[37] Maraknya publikasi di media massa, terutama media

36 Wawancara wakil kepala sekolah bidang sarprashum menyebutkan ada 21 ekstrakurikuler, 30 Januari 2023.
37 Wawancara Komite Sekolah yang menyebutkan ada 26 ekstrakurikuler di SMAN 53, 4 Februari 2023.
38 Lihat dalam Admin Jabodetabek, SMA 53 Negeri Jakarta Punya Segudang Prestasi yang Berasal Dari

online, di antaranya juga hadir karena sinergi dan kolaborasi yang baik antara pihak sekolah dengan komite sekolah yang seorang pensiunan polisi di Mabes Polri yang juga Ketua Gerakan Perubahan Indonesia Baru (GPIB) dan ketua Media Independen Online (MIO) DKI Jakarta.[38]

SMAN 53 Jakarta memberi contoh bagaimana nilai-nilai penerimaan afirmatif terhadap moderasi beragama menemukan praktik yang kaya dalam struktur dan kultur sekolah yang sudah berlangsung jauh sebelum diskursus moderasi beragama muncul. Di antara bentuk-bentuk kegiatan dan kebijakan di SMAN 53 Jakarta yang dapat dilihat sebagai praktik moderasi beragama adalah sebagai berikut.

II.2.c.i. Supervisi Kegiatan Keagamaan

Sejumlah penelitian tentang diskursus keagamaan di sekolah memberikan perhatian terhadap peran organisasi ekstrakurikuler keagamaan yang dijalankan oleh siswa sebagai salah satu pintu masuk transmisi diskursus keagamaan yang beragam baik yang toleran dan intoleran maupun radikal. Otoritas yang didapatkan oleh siswa dalam mengelola kegiatan ekstrakurikuler keagamaan sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan pelajaran organisasi dan kemandirian, selain penguatan spiritualitas keagamaan. Tetapi pada praktiknya tidak sedikit yang menggunakan otoritas ini untuk memasukkan ide-ide radikal dan bahkan membangun kultur intoleran, segregatif dan kekerasan dan diskriminatif

Siswa Bertalenta, 1 Agustus 2022, sebagaimana diunduh dari laman https://jppos.id/pendidikan/sma-53-negeri-jakarta-punya-segudang-prestasi-yang-berasal-dari-siswa-bertalenta/

39 Selain dari berbagai pemberitaan, sinergi antara sekolah dengan komite sekolah ini juga beliau nyatakan dalam wawancara. Informasi dan pengakuan senada juga disampaikan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, alumni dan Wakil Orang tua Murid Kelas (WOTK) dalam wawancara pada kesempatan lainnya. Peneliti berkesempatan untuk wawancara langsung dengan komite sekolah, saat sekolah bekerjasama dengan komite sekolah dan GPIB menyelenggarakan kegiatan bertajuk Ceramah Anti Narkoba, yang menghadirkan Bapak Dr.Victor dari Mabes Polri.

berdasarkan sentimen keagamaan.[39] Pimpinan SMAN 53 Jakarta bisa jadi memahami temuan-temuan riset ini, sehingga kemudian mengambil kebijakan untuk memperkuat supervisi terhadap organisasi ekstrakurikuler keagamaan siswa.

Kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di SMAN 53 Jakarta antara lain oleh ROHIS, ROHKRIS, dan ROHKAT; yang tidak hanya diserahkan kepada para siswa namun juga mendapatkan supervisi dari guru pembina atau guru pendamping yang ditugaskan. Kebanyakan guru pembina adalah guru pelajaran pendidikan agama dari berbagai agama yang ada dan diyakini siswa di sekolah tersebut. Seorang guru pembina menjelaskan arti penting tugasnya dalam memberikan supervisi. Menurutnya, problem terjadi manakala banyak kegiatan ROHIS ditinggalkan oleh guru agamanya; sehingga aktivitas ROHIS banyak dipegang guru-guru lain dan cenderung mengundang berbagai pihak dari luar termasuk di dalamnya alumninya sendiri. Namun, dalam konteks SMAN 53 Jakarta, ROHIS secara intensif dibina oleh guru PAI. Sehingga, meskipun para siswa diberikan ruang untuk bisa menyampaikan materi kepada sesama rekannya, guru PAI tetap memiliki kontrol terhadap apa yang hendak disampaikan oleh pengurus ROHIS kepada rekan-rekannya. Proses pendampingan atau supervisi bisa dilakukan dengan banyak cara termasuk melakukan validasi atas kualifikasi pendidik dan *screening* terhadap narasumber dari luar dalam kegiatan keagamaan, sebagaimana diungkapkan oleh seorang guru pendamping, Guur PAI AS yang dikutip di atas.

Kegiatan keagamaan dilaksanakan berdasarkan keyakinan agama masing-masing siswa atau secara monoreligius. Sekolah

40 Salim H. dkk. Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di Sekolah Menengah Umum Negeri di Yogyakarta. Center for Religious and Cross-cultural Studies, Universitas Gadjah Mada, 2011.

menyediakan ruang dan jadwal bagai masing-masing kelompok agama untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Masing-masing kegiatan agama menerapkan standar etik internal di lingkup kegiatan agama. Misalnya, dalam kegiatan kajian ROHIS pengurus menerapkan kebijakan wajib pakai jilbab untuk siswi selama kegiatan. Di luar kegiatan sekolah tidak menerapkan kewajiban memakai jilbab termasuk kepada siswi muslim. Seorang guru pendamping ROHIS menjelaskan bahwa kewajiban memakai jilbab diterapkan hanya ketika kegiatan belajar Al-Qur'an.[40]

Hal ini selaras dengan aturan berpakaian yang diterapkan di SMAN 53, siswi muslim tidak diharuskan untuk memakai jilbab, mengingat dalam aturan di DKI Jakarta memang ada aturan bahwa tidak boleh memaksakan cara berpakaian kepada siswa. Oleh karena itu, tidak semua siswi di sekolah ini berjilbab, karena berjilbab atau tidak berjilbab itu adalah pilihan individu dan berdasarkan kesadaran masing-masing. Oleh karenanya, untuk semua siswi yang akan melaksanakan salat (baik yang berjilbab maupun tidak), masjid menyediakan mukena untuk bisa dipakai oleh mereka. Selain itu, setiap Senin seluruh warga sekolah dibiasakan untuk mengenakan pakaian adat Betawi seperti kebaya dan pangsi.[41]

Kebijakan penting lain terkait supervisi kegiatan keagamaan di sekolah arahan untuk mengakomodasi budaya lokal. Kebijakan ini penting sejalan dengan salah satu indikator moderasi beragama yaitu penghargaan terhadap budaya lokal. Di SMAN 53 Jakarta, kegiatan ROHIS mencakup seni religi bernuansa budaya lokal seperti hadrah dan marawis.

41 Wawancara guru agama SMAN 53 Jakarta, 24 Januari 2023.
42 Wawancara dengan Waka Sarprashum SMAN 53 Jakarta, 30 Januari 2023.

Gambar 7. Kegiatan keagamaan ROHIS (Keputrian) & ROHKAT di SMAN 53 Jakarta

II.2.c.ii. Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Damai

SMAN 53 Jakarta bisa dibilang cukup maju dalam penerapan nilai-nilai yang sejalan dengan moderasi beragama. Hal ini tidak lepas dari peran kemitraan SMAN 53 Jakarta dengan sejumlah organisasi nirlaba yang mempunyai perhatian terhadap isu toleransi dan perdamaian. Tercatat sekolah adalah mitra dari sebuah asosiasi guru agama yang mempunyai visi untuk mempromosikan pendidikan agama yang inklusif. Guru PAI di SMAN 53 Jakarta adalah pengurus DPP AGPAII. Hal ini membuka pintu bagi sekolah ini untuk membangun kemitraan dengan organisasi nirlaba lain yang mempunyai visi yang sama selain prinsip Sekolah Ramah Anak dan Profil Pelajar Pancasila yang sudah menjadi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Visi Sekolah Damai mencakup upaya menumbuhkan nilai-nilai perdamaian dalam ekosistem sekolah yang mencakup pilar kebijakan, pilar lingkungan sekolah, dan pilar tata organisasi siswa. Salah satu masalah yang direspons oleh program Profil Pelajar Pancasila dan Sekolah Damai di SMAN 53 Jakarta adalah terkait

dinamika kelompok, yaitu program geng di kalangan pelajar. Mekanisme respons terhadap masalah pelajar ini dijelaskan oleh seorang guru berikut:

> "...Kalau ada entitas-entitas yang meninggikan kelompoknya sendiri, itu sangat berbahaya dan rentan sekali juga. Makanya, saya juga menyatakan bahwa sekolah itu salah satu celahnya adalah geng. Dan itu biasanya turun-temurun, angkatan sekian sampai tahun sekian. Hanya saja sejauh itu kesiswaan (wakil kepala sekolah bidang kesiswaan) selalu bisa mengatasi itu, mencari tempat nongkrongnya dan lain sebagainya yang itu terkikis habis pada akhirnya. Kemudian sampai pada pola-pola penanganan anak yang kemudian edukatif. Mulai dari pemanggilan, pembinaan oleh walas (wali kelas), walas nggak bisa diserahkan atau berkolaborasi dengan BK, BK nggak lepas lalu ke wakil, wakil nggak bisa, langsung ke kepala sekolah. Ada proses-proses seperti itu tadi yang mencoba menekan hal-hal yang sifatnya eksklusif tadi. Jadi misalnya ada mungkin kasus-kasus atau pertentangan-pertentangan yang terjadi, sehingga clear. (Pembina ROHKAT)[42]

Paparan di atas menunjukkan bagaimana model kemitraan sekolah dengan organisasi-organisasi di luar yang mengusung visi perdamaian, toleransi, dan isu-isu universal lain dapat berperan instrumental dalam mewujudkan indikator nilai moderasi beragama.

II.2.c.iii. Cahaya Cinta dan Budaya Moderasi Beragama di Sekolah

SMAN 53 Jakarta memberi pelajaran bagaimana moderasi beragama tidak diterapkan sebagai sebuah proyek atau program yang datang dari luar. Meski demikian bukan berarti moderasi beragama absen dalam berbagai bidang kegiatan di sekolah. Sebaliknya, nilai-nilai moderasi beragama dapat ditemukan secara integratif dalam berbagai bentuk kegiatan, yang tidak terbatas dalam ruang lingkup yang sempit pada kegiatan keagamaan.

Ada beberapa kegiatan inovatif di SMAN 53 Jakarta yang di

43 Wawancara dengan Guru PKN dan Pembina ROHKAT, 4 Februari 2023.

dalamnya ditemukan praktik moderasi beragama. Yang pertama adalah projek kegiatan atau riset siswa dengan mengambil tema-tema yang dekat dengan nilai-nilai moderasi beragama. Ada tiga tema project siswa, yaitu “Bangunlah Jiwa Raganya”, “Bhinneka Tunggal Ika”, dan “Kewirausahaan”. Setiap kelas bisa menampilkan karya akademik dan kreasi seni, pakaian adat dari Sabang sampai Merauke.

Yang kedua adalah internalisasi nilai-nilai cinta tanah air, wawasan kebangsaan dan budaya damai yang secara rutin dilakukan melalui upacara bendera. Tidak jarang SMAN 53 Jakarta bekerjasama dan mengundang narasumber dari AGPAII, kepolisian, hingga BPIP untuk menghadirkan eks-napiter dan mantan pengikut gerakan ekstrem seperti Ken Setiawan (mantan NII) dan lainnya untuk berbicara dan berbagi pengalaman mereka langsung kepada siswa. Saat ini, SMAN 53 Jakarta juga sedang menginisiasi Laboratorium Pancasila bekerjasama dengan BPIP yang belum lama lagi akan dilaunching.

Yang ketiga adalah pembiasaan budaya yang mencerminkan kepribadian mulia dalam berbagai program, termasuk yang saat ini diperkuat oleh pimpinan sekolah adalah budaya 3S (Senyum, Sambut, dan Sapa) dan Cahaya Cinta. Pembudayaan 3S di SMAN 53 Jakarta dilakukan dalam bentuk penugasan secara bergilir kepada siswa untuk menyambut teman-temannya di pintu gerbang masuk sekolah. Sementara program Cahaya Cinta diwujudkan dengan penanaman nilai-nilai ketulusan dalam menjalankan tugas dengan menghilangkan pamrih berlandaskan kesadaran untuk Berketuhanan Yang Maha Esa.

Gambar 8. Kegiatan Cahaya Cinta dan budaya 3S di SMAN 53 Jakarta

Yang keempat adalah membangun praktik demokratis dan kultur non-diskriminatif melalui organisasi kesiswaan. Hal ini terlihat dalam keragaman pemimpin organisasi kesiswaan baik secara agama dan gender. OSIS SMAN 53 Jakarta justru diketuai oleh seorang siswi. Sementara, ketua Majelis Perwakilan Kelas (MPK)-nya adalah seorang siswa yang beragama Katolik.[43] Hal ini menarik karena SMAN 53 Jakarta telah berhasil mendobrak gender stereotype tentang kepemimpinan perempuan maupun stigma terhadap minoritas agama. Bisa dikatakan, bahwa dalam konteks sekolah menengah tingkat atas ini, moderasi beragama diterapkan di dalam kegiatan P5 Kurikulum Merdeka. Meskipun secara umum, pengenalan mengenai membangun sikap moderat dalam beragama, menghargai kemajemukan, membangun toleransi, lebih banyak diintegrasikan dalam pelajaran agama maupun PPKN.

Ibu DH (orang tua siswa) yang merupakan pengurus IKBA 58 dan salah seorang wali orang tua kelas (WOTK). Ibu DH menggambarkan bagaimana kultur non-diskriminatif ini terwujud da-

44 Keterangan yang disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah dan juga obrolan dengan Ketua OSIS dan Ketua MPK periode 2021-2022, 31 Januari 2023.

lam kehidupan siswa:

> Ya. Malah, dia wakilnya laki-laki. Jadi, dia sepasang. Nah, waktu itu MPK-nya laki-laki dan laki-laki. MPK-nya ini Nasrani. Terus under-nya Dinar, di bagian bendahara dan seksi kegiatan, ada yang Nasrani dan ada yang Buddha. Jadi memang mereka kolaborasinya itu tetap. Misalnya mereka mau ada rapat di hari Minggu. Lalu ada yang bilang, "Wah, hari Minggu aku lagi ibadah, nih." Lalu ditanya kembali, "Ibadah sampai jam berapa? Kita mulai meeting-nya habis itu saja." Oke. Nah, begitu.

II.2.d. Praktik Moderasi Beragama di MAN Insan Cendekia Sumatra Barat

MAN Insan Cendekia adalah madrasah menengah atas negeri di bawah Kementerian Agama. Posisi struktural di bawah Kemenag yang menjadi *leading sector* program moderasi beragama pemerintah demikian mengasumsikan sikap afirmatif dari manajemen pelaksana sekolah ini. Hingga tahun 2020, tercatat ada 23 kampus MAN Insan Cendekia tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. MAN Insan Cendekia dirancang untuk menjadi sekolah favorit yang menyiapkan generasi muslim unggul baik di bidang sains maupun ilmu sosial. Sebagai unggulan dengan fasilitas beasiswa bagi seluruh peserta didik, seleksi masuk MAN Insan Cendekia bisa dibilang ketat dan karena itu input peserta didik bagi jaringan sekolah ini bisa dibilang adalah anak-anak muda yang mempunyai keunggulan terutama secara akademik.

Meski demikian, kekhawatiran bahwa jaringan sekolah unggul yang ribuan lulusannya mempunyai peluang diterima di kampus-kampus terbaik Indonesia ini tidak luput dari kekhawatiran atas paparan ideologi radikal. Kekhawatiran ini bahkan dikemukakan sendiri oleh Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas. Merujuk ke sebuah survei, menteri agama menyampaikan peringatan cukup keras berikut pada bulan Oktober tahun 2021 dalam sebuah acara

peringatan 25 tahun MAN Insan Cendekia:

> Bapak Ibu sekalian, data yang saya baca itu mengerikan, hasil survei yang saya baca itu sungguh tidak menyenangkan, bagaimana anak-anak kita, anak-anak sekolah kita di madrasah termasuk di IC, mulai terpapar dengan ajaran ajaran yang intoleran, ajaran-ajaran yang tidak memberikan ruang perbedaan terhadap yang lain.[44]

Lebih lanjut ia merujuk ke salah satu MAN Insan Cendekia yang menempati ranking pertama SMA terbaik di Indonesia. Ia menyatakan:

> Ini harus dimoderasikan, jangan merasa kemudian anak-anak kita yang keluar dari MAN IC (Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia) Serpong ini pemahamannya keagamaannya kaku, hanya yang seperti dirinya saja yang dianggap yang benar sementara yang berbeda dengan dirinya salah.[45]

Peringatan keras yang berasal dari seorang pejabat tertinggi Kementerian Agama yang membawahi jaringan MAN Insan Cendekia bisa diterima sebagai pukulan telak yang menuntut kajian lanjut realitasnya di lapangan. Salah satu indikasi yang bisa dilihat adalah sejarah kerjasama MAN IC yang disebut dalam pernyataan menteri di atas dengan lembaga bimbingan belajar Nurul Fikri, yang oleh sebagian kalangan dituduh berkaitan dengan partai politik dengan basis ideologi Ikhwanul Muslimin. Tentu tuduhan atau dugaan seperti ini perlu dibuktikan karena bisa jadi ini merujuk pada situasi lama dan saat ini sudah terjadi perubahan ke arah yang berbeda, apalagi dengan semakin kuatnya tuntutan struktural untuk melaksanakan agenda moderasi beragama.

MAN Insan Cendekia Sumatra Barat berlokasi di Kabupaten Padang Pariaman. Berdiri pada 2016, prestasi terbaik madrasah ini menempati peringkat ketiga di level Sumatra Barat dan peringkat

45 https://tangerangupdate.com /menag-yaqut-cholil-qoumas-sebut-siswa-i-madrasah-mulai-terpapar-radikalisme/

46 Ibid.

70 di level berdasarkan hasil nilai ujian nasional jenjang SMA/SMK/MAN di tahun 2020 dan 2021. Bisa dipahami peminat untuk belajar di MAN Insan Cendekia Sumatra Barat cukup tinggi. Pada 2017, jumlah pendaftar sebanyak ±1300 orang, tahun 2018 ±1500 orang. Saat ini jumlah peserta didik adalah 302 orang.

Sebagai lembaga di bawah Kementerian Agama, praktik moderasi beragama di MAN Insan Cendekia menjadi program yang mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah atau RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga). Menurut Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan MAN IC, program ini dilaksanakan dalam bentuk seminar penguatan moderasi beragama yang dilaksanakan secara paralel untuk guru dan murid setiap tahun pada tanggal 11 Februari. Kami belum mendapatkan laporan lebih detail pelaksanaan kegiatan ini terkait siapa yang diundang sebagai narasumber dan kegiatan yang lain. Selain itu, program moderasi beragama juga dilaksanakan dalam beberapa bentuk lain seperti mengirimkan guru dan siswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan moderasi beragama di luar. Guru dan siswa yang telah mendapatkan pembekalan (sebagai fasilitator) moderasi beragama menjadi ujung tombak atau rujukan terkait isu dan penguatan moderasi beragama di sekolah seperti wakil kepala sekolah bidang asrama yang tahun ini rutin mengikuti kegiatan penguatan dari Kemenag maupun lembaga lainnya. Menurut pengakuan sejumlah siswa, kegiatan yang dipimpin oleh wakil kepala sekolah bidang asrama biasanya dilakukan di lingkup tugasnya sebagai penanggung jawab asrama dengan kegiatan-kegiatan di asrama seperti nonton bareng, pengembangan karakter dan diskusi dengan mengundang narasumber dari luar yang biasanya berasal dari kalangan anak muda agar lebih mudah

diterima oleh siswa.

Di luar praktik-praktik yang sudah terencana sebagai program moderasi beragama di atas, kami mencatat sejumlah praktik lain yang dapat menggambarkan bagaimana gagasan moderasi beragama diterima dan diwujudkan dalam ranah praktis.

II.2.d.i. Moderasi Beragama dalam Toleransi Intra-Agama dan Kesalehan

Sebagai madrasah dengan komposisi siswa yang homogen muslim, terlihat cukup jelas bahwa toleransi intra-agama menjadi titik tekan dalam praktik moderasi beragama. Lebih sempit lagi, toleransi intra-agama yang paling menonjol berkaitan dengan aspek ritual keagamaan. Ketika berbicara tentang praktik moderasi beragama dalam aktivitas sehari-hari, seorang responden merujuk pada keragaman praktik dalam membaca *zikir* atau *wirid* setelah salat berjamaah. Menyikapi perbedaan praktik kalangan NU dan Muhammadiyah terkait apakah bacaan wirid dibaca secara keras (*jahr*) atau masing-masing, hal ini disiasati dengan menggabungkan kedua tradisi, di mana imam membaca wirid dengan suara pelan (tanpa mikrofon) dan dilanjut doa dengan suara keras (pakai mikrofon). Akomodasi tata cara ibadah yang berbeda ini diceritakan oleh seorang responden berikut:

> Di masjid ada imam, ada anak-anak yang mohon maaf yang berasal dari Muhammadiyah, ada yang dari NU dan beberapa lainnya kan sebenarnya itu hanya sebuah organisasi tapi mereka memiliki beberapa kebiasaan, saya memaknainya seperti itu. Jadi, pada saat mereka mengimam itu tidak ada dikotomi atau perbedaan di antara mereka, contoh di saat si A mengimam mereka mensirrkan bismillah tidak ada yang protes, di saat si B menjadi imam membaca qunut tidak ada yang protes karena kita tanamkan yok kita hidup di MAN IC saling toleransi bahasanya begitu dalam hal memahami beberapa keyakinan itu pun kita belajar dari imam-imam kita Imam Gazhali, Imam Hambali... seperti itukan mereka juga berbeda cara memahami Islam itu

> tetapi mereka tetap menghargai di mana mereka berada. (FR, Waka Asrama)[46]

Lebih lanjut Kepala MAN Insan Cendekia Sumbar juga menegaskan soal pembiasaan budaya toleran dalam hubungan sehari-hari. Secara khusus ia mengatakan moderasi beragama dengan visi ukhuwah Islamiyah yang dituangkan dalam buku tata tertib sekolah.

> Buku Tatib MAN IC Siswa diwajibkan menciptakan suasana keakraban dan toleran dalam bersikap, berbicara dan bertindak demi terwujudnya Ukhuwah Islamiyah."

Kesadaran tentang moderasi beragama dalam konteks kehidupan intra-agama ini juga terlihat dalam praktik gagasan moderasi beragama dalam bentuk penguatan akidah dan keilmuan (fiqh, akhlaq, pendidikan agama Islam), penekanan pada pilihan mazhab agama sesuai latar belakang masing-masing dan program ritualitas lain seperti setoran hafalan Al-Quran. Seorang siswa mengingat bagaimana ia belajar moderasi beragama dalam pelajaran akidah akhlak:

> "Tentang moderasi beragama ini kan dalam kurikulum belajar itu mata pelajaran akidah akhlak kelas 10 sudah disinggung tentang moderasi beragama... ada satu bab itu tentang apa itu pertengahan Islam, ada bab dalam akidah akhlak itu membahas tentang itu, Bang." (J, Siswa MAN IC)[47]

II.2.d.ii. Moderasi Beragama dalam Relasi Gender dan Keragaman Berbusana

Dalam buku panduan moderasi beragama yang diterbitkan Kementerian Agama, isu kesetaraan gender tidak secara khusus disebut sebagai salah satu indikator moderasi beragama. Meski demikian, visi progresif terkait penghormatan terhadap nilai

47 Wawancara Waka Asrama, 19 Januari 2023.
48 Wawancara dengan siswa, 19 Januari 2023.

kesetaraan gender tercakup dalam pemaknaan terkait praktik moderasi beragama di MAN Insan Cendekia, Sumatra Barat. Meski demikian, hal ini dapat dilihat sebagai manifestasi dari indikator antikekerasan. Indikator ini bisa mencakup prinsip anti-kekerasan fisik maupun nonfisik, termasuk diskriminasi berdasarkan gender dan paham keagamaan.

Lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren, banyak yang menerapkan kebijakan yang memisahkan kelas berdasarkan jenis kelamin (putra dan putri). Hal demikian tidak terjadi di MAN Insan Cendekia Sumbar di mana kegiatan belajar tidak memberikan batasan laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil observasi, siswa laki-laki bisa menyetor hapalannya kepada siswi begitu juga sebaliknya, seorang responden juga merujuk pada praktik setoran hapalan Quran untuk menggambarkan kebijakan ini:

> Dalam setoran hapalan Al-Qur'an tidak ada batasan laki-laki dan perempuan, ruang setara dan moderat terlihat dari kultur ibadah dan kegiatan di masjid.[48]

Prinsip nondiskriminatif terkait gender juga diberikan dalam konteks pemilihan ketua organisasi kesiswaan seperti OSIS. Seorang responden menceritakan pengalamannya dalam pemilihan organisasi kesiswaan yang ia sebut sebagai praktik demokrasi di madrasah, sebagai berikut:

> Kultur demokrasi telah diterapkan dalam aktivitas asrama MAN IC Padang Pariaman, salah satunya ialah proses pemilihan ketua pengurus IKAS Putra dan Putri. Proses pemilihan ketua pengurus IKAS Putra maupun IKAS Putri dilakukan dengan pemilihan langsung yang dipilih dari seluruh siswa-siswi madrasah. Ketua pengurus IKAS Putra dipilih secara langsung melalui voting dari semua siswa MAN IC Padang Pariaman. Ketua pengurus IKAS Putri dipilih secara langsung melalui voting dari semua siswi MAN IC Padang Pariaman. Hal ini menunjukkan, proses pendidikan demokrasi yang merupakan indikator dalam moderasi beragama telah sejak dini diterapkan dalam aktivitas asrama

49 Wawancara Waka Asrama, 19 Januari 2023.

MAN IC Padang Pariaman. (Pengurus IKA)[49]

Praktik demokrasi demikian juga dapat dilihat sebagai praktik indikator komitmen kebangsaan dari moderasi beragama. Hal ini patut dicatat karena dalam narasi kelompok seperti HTI, demokrasi digambarkan sebagai sistem politik kufur dan anti-Islam. Pembiasaan praktik demokrasi dapat menumbuhkan sikap kritis terhadap propaganda anti demokrasi dari HTI dan kelompok-kelompok ekstrem lain.

Meski demikian, seorang responden juga memberikan catatan bahwa dalam lingkup madrasah proses praktik demokrasi dan toleransi demikian juga perlu dilaksanakan dalam koridor. Salahnya satu koridor yang disebut adalah nilai kepatuhan pada guru pendamping atau disebut Tuan Kuh di MAN Insan Cendekia Sumatra Barat, seperti berikut:

> "Kalau di sini ada istilah Tuan Kuh mereka harus taat dan patuh dengan pimpinan agama mereka, itu silakan kita hargai. Itukan kaitan individu tapi di saat kita melakukan kegiatan secara bersama di sini kita juga harus mengikuti pola-pola secara bersamaan. Itulah salah satu bentuk implementasi kita menerapkan moderasi beragama secara internal. Kebetulan, lingkungan kita di dalam MAN IC mayoritas adalah muslim." (Waka Asrama)

Pembudayaan nilai moderasi agama dalam bentuk toleransi dan antikekerasan juga dipraktikkan dalam bentuk penghargaan terhadap gaya berbusana, yang tentu saja dalam batas aturan berbusana muslim di lingkungan lembaga pendidikan Islam. Praktik moderasi beragama dalam konteks keragaman busana terlihat dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti lapangan di mana sebagian besar siswa bersarung tapi ada juga yang bercelana panjang bahkan ada yang berpakaian gamis. Sebagian

50 Wawancara dengan Pengurus IKA (Ikatan Keluarga Asrama), 19 Januari 2023.

besar siswa menggunakan peci dan ada juga yang tidak berpeci. Berpecinya juga beragam, ada yang berpeci seperti peci ustaz, berpeci hitam nasional, berpeci soblok sederhana, bahkan ada yang menggunakan penutup kepala tradisional. Cara berbusana yang bervariasi ini menunjukkan bagaimana implementasi moderasi.[50]

51 Hasil observasi kegiatan asrama dan keagamaan di masjid pada 17 Februari 2023.

II.3. Resistensi, Negosiasi, dan Keterbatasan

Riset ini berangkat dari asumsi bahwa setiap perubahan di sebuah lembaga, apalagi yang menyangkut dimensi personal dan ideologis keagamaan, tidak akan selalu berjalan satu arah. Dinamika respon bisa muncul dalam spektrum melawan (resisten) hingga mendukung (konformis). Tarik menarik antara kekuatan lama yang ingin mempertahankan ideologi dan kultur yang mereka yakini atau bela dengan mereka yang mendukung perubahan akan ditentukan oleh relasi kuasa dan karakter personal aktor-aktor kunci dalam lembaga tersebut. Tidak jarang para pemimpin memilih jalan tengah untuk menjaga harmoni dan stabilitas dengan mengasosiasikan agenda perubahan. Mereka menghindari perubahan yang menyeluruh dan memilih untuk mengakomodasi kepentingan atau nilai yang diusung oleh kekuatan-kekuatan lama dan baru. Dari kemungkinan-kemungkinan tersebut kami menemukan dua pola di empat lokasi penelitian ini. Yang pertama adalah pola konformis di BSI dan SMAN 53 Jakarta. Pada pola konformis di BSI pada awalnya dihadapi secara resisten oleh sebagian segmen dalam lembaga BSI tetapi kemudian sikap konformis menemukan titik kemapanan. Yang kedua adalah pola negosiasi yang kita temukan di PLN dan MAN Insan Cendekia Sumatra Barat.

II.3.a. BSI dan SMAN 53 Jakarta: Dari Resistensi ke Konformisme

BSI dan SMAN 53 Jakarta adalah dua lembaga yang menunjukkan respons konformasi atau sepenuhnya mendukung agenda moderasi beragama. Meskipun, sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, promosi moderasi beragama tidak digunakan sebagai label program, tetapi terlihat ada upaya cukup progresif untuk melakukan perubahan baik secara struktural maupun kultural yang dapat dilihat sebagai praktik moderasi beragama.

Di BSI, pengalaman para peneliti saat melakukan wawancara maupun observasi, terlihat ekosistem moderasi terbangun cukup baik. Proses komunikasi dan wawancara dengan manajemen, karyawan, pengurus masjid, CSR, semuanya berjalan dengan mulus, lancar dan tidak ada hambatan sama sekali. Seluruh permintaan data yang dibutuhkan dilayani dengan baik. Bahasa, diksi, narasi, sikap, dan bahasa tubuh dari responden menunjukkan kematangan dalam memahami pentingnya moderasi beragama. Peneliti lapangan diajak keliling kantor, melihat situasi ruangan, pola hubungan dan cara berpakaian, dan semuanya tidak ditemukan indikasi yang mengarah pada ideologi radikal dan intoleran.

Hal ini menarik karena sebagai bank dengan label syariah BSI ternyata menekankan pada identitas modern dan profesional. Tidak ada ciri khas keislaman yang terlalu menonjol di lingkungan BSI meskipun pegawai perempuan wajib memakai jilbab. Sesungguhnya, kebijakan terkait *dress code* berperan signifikan dalam proses perubahan ke arah penguatan moderasi beragama. Proses perubahan bisa dibilang berlangsung cukup cepat seiring dengan bergabungnya tiga bank syariah (Mandiri Syariah, BRI Syariah dan BNI Syariah) pada awal tahun 2021. Pegawai membawa kultur yang berbeda ketika bergabung, termasuk mereka yang berasal dari BNI Syariah yang menurut pengakuan sejumlah respon membawa kultur yang cenderung Islamis. Manajemen baru di lembaga BSI menyatukan kultur dengan menekankan karakter modern, pelaksanaan core values perusahaan dan yang paling terlihat secara visual berkaitan dengan aturan berbusana.

Kebijakan soal busana ini ternyata menyentuh aspek ideologi keagamaan sehingga menimbulkan resistensi dari sebagian segmen pegawai. Pada awalnya banyak pegawai berbusana dengan ciri pakaian islami tetapi kemudian dituntut untuk menyesuaikan diri dengan

kebijakan penyeragaman model berpakaian. Mereka yang tidak nyaman dengan kebijakan ini akhirnya memilih keluar atau mengundurkan diri dari perusahaan. Proses pengunduran diri mereka terjadi tidak secara langsung, tetapi berangsur-angsur selama kurang lebih hampir satu tahun. Mereka mengundurkan diri bukan semata-mata karena *dress code* tetapi terutama ekosistem BSI lebih kental dengan nuansa modern, inklusif dan moderat, ekosistem yang berbeda jauh dengan BNI Syariah yang sangat bernuansa islami, baik dari segi pakaian, lingkungan maupun pelaksanaan ibadah.

Tidak bisa dipungkiri debat soal kehalalan kerja di bank, termasuk bank syariah, berkaitan dengan hukum riba sudah lama terjadi di kalangan muslim. Kelompok salafi bahkan sudah menunjukkan sikap kritis tidak hanya terhadap bank konvensional tetapi juga bank syariah. Hal ini terlihat dari pengakuan seorang jamaah salafi yang menceritakan alasan pengunduran dirinya dari sebuah bank syariah di situs terafiliasi Yufid yang berhaluan salafi sebagai berikut:

> Meskipun saya saat itu berusaha "mengebalkan" diri dari kegelisahan, namun hal itu tidak membuat saya berhenti untuk mempelajari isu-isu syariah di perbankan syariah. Mulailah saya membaca artikel-artikel dan video Youtube dari pakar fiqih muamalah seperti Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi dan Ustadz Ammi Nur Baits yang banyak mengkritisi praktik-praktik perbankan syariah. Sebagai "penyeimbang" saya juga terkadang membaca artikel dari Ustadz "A" yang sangat pro dengan bank syariah. Ustadz A selalu mengingatkan bahwa abank syariah itu sudah 100% syariah karena didukung fatwa-fatwa DSN-MUI yang kapabilitasnya tidak diragukan lagi. Tapi sayangnya yang sering saya temukan di lapangan adalah praktik-praktik yang nyata-nyata melanggar fatwa. Tentu kita bisa mengatakan bahwa yang melakukan pelanggaran adalah "oknum" sehingga saya tidak bisa menyalahkan bank X secara keseluruhan. Tapi hal yang membuat saya miris adalah penyimpangan syariah ini seolah-olah berubah menjadi "SOP" yang dijalankan sebagai bagian dari rutinitas Bank X. Dengan kata lain oknum di sini bukan menunjuk pada individu. Oknum tersebut adalah bank itu sendiri.[51]

52 https://pengusahamuslim.com/6121-kenapa-aku-resign-dari-bank-syariah-kisah-mantan-karyawan-bank-syariah.html

Bisa jadi nilai seperti inilah yang kontradiktif dengan nilai yang dipegang oleh manajemen dan kemudian termanifestasi melalui isu aturan berpakaian. Agenda moderasi beragama dapat menemukan titik temu dengan kepentingan bank syariah dalam konteks konsolidasi nilai yang dipegang perusahaan. Dari sini dapat dipahami jika mereka yang memiliki resistensi terhadap nilai perusahaan kemudian memilih untuk keluar; dengan demikian konformisme terhadap agenda moderasi beragama mendapatkan titik kemapanan di BSI paling tidak sampai saat penelitian ini dilakukan.

Di SMAN 53 Jakarta, peneliti menemukan pola konformis tanpa resistensi. Sekolah ini pernah disalahpahami sebagai SMAN di Jakarta lain yang pernah dilaporkan terkait kasus intoleransi. Pihak SMAN 53 menegaskan bahwa kasus yang diberitakan tersebut terjadi di SMAN lain di Jakarta. Sebaliknya di SMAN 53 nilai-nilai yang termuat dalam indikator moderasi beragama sudah cukup lama terinternalisasi dalam ekosistem sekolah. Keterbukaan sekolah untuk bekerjasama dengan sejumlah organisasi nirlaba yang mempunyai visi pluralisme dan perdamaian seperti AGPAII merefleksikan komitmen kuat pimpinan sekolah terhadap moderasi beragama. Sekolah juga sangat aktif dalam menjalin kerjasama dan bersinergi dengan lembaga pemerintah seperti BPIP dan kepolisian hingga sering menjadi sekolah percontohan sebagai Sekolah Penggerak hingga Laboratorium Pancasila. Hal ini membuka jalan yang lapang bagi inovasi-inovasi dalam membumikan moderasi beragama dalam berbagai kegiatan pembelajaran di sekolah.

II.3.b. PLN dan MAN Insan Cendekia Sumatra Barat: Negosiasi Moderasi Beragama

Jika di kedua lembaga sebelumnya sikap penerimaan dan praktik moderasi beragama berkembang cukup mapan tanpa menggunakan

label moderasi beragama, di pola yang kedua ini kami menemukan nilai dan praktik yang menegosiasikan moderasi beragama, justru ketika label program moderasi beragama digunakan dan bahkan mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah. Dalam pola negosiasi ini, moderasi beragama tidak ditolak, tetapi diterima dengan pemaknaan dan praktik dalam lingkup batasan nilai yang dipegang oleh pelaku.

Hal ini ditemukan dalam kasus MAN Insan Cendekia Sumatra Barat. Pola negosiasi di madrasah ini terjadi baik di ranah pemikiran maupun praktik. Di ranah pemaknaan, sejumlah respons menunjukkan penerimaan agenda moderasi beragama yang disertai dengan sikap kewaspadaan terkait batas atau koridor perilaku moderat dalam beragama. Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, sikap kewaspadaan ini terutama berkaitan dengan kekhawatiran kemungkinan moderasi beragama dilaksanakan melampaui batas. Batas yang ditarik adalah masalah akidah. Sebagian responden dari MAN Insan Cendekia baik dari kalangan siswa maupun guru menarik batas moderasi beragama di tataran muamalah atau hubungan sosial, jangan sampai merusak akidah. Dengan penekanan seperti ini bisa jadi ada hambatan (*barrier*) secara psikologi untuk berinteraksi dengan mereka yang berbeda keyakinan. Apalagi lingkungan agama MAN Insan Cendekia bersifat monoreligius. Banyak penelitian tentang toleransi dan relasi antarkelompok menunjukkan bahwa pengalaman dengan keragaman berpengaruh besar terhadap tingkat toleransi. Kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka yang berbeda keyakinan di lingkungan MAN Insan Cendekia bisa membuat siswa tidak siap untuk bersikap terbuka dalam konteks masyarakat yang lebih beragam secara agama.

Bentuk negosiasi yang kedua terlihat di ranah praktis dan ini memperkuat poin keterbatasan dalam interaksi lintas agama di atas. Praktik moderasi beragama di MAN Insan Cendekia lebih menekankan

pada toleransi intern agama terkait aspek ritual Islam *(ubudiyah).* Kepala Sekolah MAN Insan Cendekia sebenarnya mempunyai perspektif yang lebih luas terkait moderasi beragama. Ia mengatakan moderasi beragama dengan gagasan nasionalisme inklusif yang berakar pada sejarah dan proses kemerdekaan yang melibatkan para pejuang yang beragam secara agama. Meski demikian gagasan ini tampaknya belum cukup diterima dengan baik di ranah praktik pembelajaran. Para siswa dan guru pendamping mengaktualisasikan moderasi beragama lebih dalam konteks aturan yang memberikan ruang bagi keragaman cara beribadah dalam salat jamaah.

Pola negosiasi juga terlihat di PLN yang bisa dibilang mengambil langkah yang lebih soft daripada BSI. Pimpinan PLN yang kebetulan seorang non-muslim tampak bertindak lebih hati-hati untuk tidak terlalu dalam memberikan batasan pada internal masing-masing agama. Hal ini tercermin dari pandangan seorang *Executive Vice President* PLN berikut:

> "Saya rasa *gini,* ini gak bisa kemudian solusi represif, gak akan bisa. Solusinya kebudayaan. Kembali lagi, kita kembalikan ke akar budayanya. Apabila kita bisa saling menghormati, kemudian saling menjaga koridor. Artinya misalnya, agamaku ya agamaku."

Kritik terhadap solusi represif memberi ruang-ruang negosiasi atau akomodasi terhadap kelompok keagamaan yang berbeda, baik kekuatan lama maupun baru. Karena itu norma dominan yang dianut di PLN ada gagasan tentang rumah bersama atau Indonesia mini, termasuk menjadi rumah bagi ekspresi keagamaan yang berbeda. Hal ini terlihat dari cerita seorang pegawai mengaku ada temannya yang penampilannya konservatif, berjenggot, dan celana cingkrang dan bersikap agak berbeda dengan non-muslim. Tapi, menurutnya, dia tidak menunjukkan pandangan keagamaannya. Sikap dan perilakunya

juga cukup terbuka dan bisa berteman dengan siapa saja.[52] Hal serupa disampaikan sendiri oleh salah seorang Executive Vice President PLN berikut:

> "Dulu hanya ada NU dan Muhammadiyah, sekarang ada Wahabi dan Salafi. Beberapa orang dengan celana cingkrang, jenggot, dan dahi hitam ada di PLN."[53]

Yang menarik keberadaan elemen HTI di serikat pekerja PLN dianggap sebagai hal yang dapat ditoleransi. Hal ini diceritakan seorang responden yang merujuk pada norma PLN sebagai Indonesia Mini. Dia mengatakan serikat pekerja yang berafiliasi HTI juga tidak secara resmi dibubarkan, karena yang dilihat adalah fungsinya, bukan background-nya. Semua agama, katanya, diberi ruang untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Keberadaan elemen HTI pada serikat pekerja PLN ini perlu ditelusuri lebih lanjut, karena ini memberikan gambaran batas negosiasi yang berbeda dari sekadar memberikan toleransi terhadap bentuk pakaian yang mencerminkan ideologi keagamaan tertentu.[54]

Dengan pola negosiasi seperti ini bisa dimaklumi jika PLN tidak melakukan langkah yang cukup agresif untuk mempromosikan nilai moderasi beragama di kantor-kantor cabang. Penelitian ini menemukan Buletin Kaffah yang diterbitkan Hizbut Tahrir Indonesia di Masjid Baitus-salam PLN Duren Tiga Jakarta Selatan, Ustaz Felix Siauw yang pernah mengisi Kajian di DKM Al-Ghafururrahim PLN UIP Jawa Bagian Barat, pada 30 Januari 2023, Ustazah Aan Rohanah seorang aktivis yang per-nah mengisi acara BKK-Rohis 08 pada April 2022.[55]

Temuan-temuan ini menunjukkan bagaimana moderasi berag-ama meskipun diterima dan dipraktikkan di lembaga pendidikan dan lembaga publik, tetapi realisasi tidak seragam karena para aktor bisa

53 Wawancara pegawai PLN dan jamaah masjid, 31/01/2023.
54 Wawancara *Executive Vice President* PLN, 25/01/2023.
55 https://news.detik.com/berita/d-1198926/protes-ruu-ketenagalistrikan-sp-pln-gandeng-hizbut-tahrir
54 Temuan observasi di PLN Duren Tiga, Jakarta Selatan, Instagram PLN Pusat dan PLN Jawa Barat.

saja menegosiasikan batas-batas yang berbeda dalam menjalankan agenda moderasi beragama.

II. 4. “Minoritas” Perempuan dan Non-Muslim dalam Praktik Moderasi Beragama

Praktik beragama yang moderat seharusnya menghadirkan perlindungan terhadap kelompok minoritas, yang bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan nonkekerasan dalam indikator moderasi beragama, perlindungan minoritas dapat terwujud dalam praktik sosial, tidak hanya bertujuan untuk menciptakan “kerukunan semu” yang mengutamakan harmoni dengan melanggengkan mayoritarianisme. Temuan terkait praktik moderasi beragama di keempat lembaga, penelitian ini menemukan beberapa catatan terkait dua kelompok minoritas, yaitu non-muslim dan perempuan.

Pertama, dua lembaga yang menjadi lokasi penelitian ini dipimpin oleh figur yang berasal dari kelompok keagamaan minoritas, yaitu PLN dan SMAN 53 Jakarta. Executive Vice President PT Telkom adalah seorang laki-laki yang beragama Katolik dan Kepala Sekolah SMAN 53 Jakarta adalah seorang perempuan beragama Kristen. Keduanya memimpin lembaga milik negara yang mayoritas pegawainya beragama Islam. Namun demikian, kedua figur pemimpin ini menunjukkan pola yang berbeda dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama. Executive Vice President PT Telkom mempunyai kecenderungan untuk bersikap hati-hati dan tidak mencampuri urusan agama terlalu dalam karena menganggap agama adalah isu sensitif. Perasaan sebagai minoritas bisa jadi mendorong yang bersangkutan untuk memilih cara aman, sehingga tidak melakukan langkah-langkah agresif dengan membatasi aliran atau golongan keagamaan tertentu dari kalangan mayoritas, termasuk mereka yang berhaluan radikal. Meski demikian terlihat jelas bahwa keberadaan salah satu figur pemimpin yang berasal dari kelompok keagamaan minoritas berperan penting dalam

menciptakan lingkungan kerja yang ramah terhadap kalangan minoritas, sebagaimana misalnya terlihat dalam kebiasaan mengucapkan, selamat Natal.

Hal berbeda ditujukkan oleh Kepala Sekolah SMAN 53 Jakarta. Ia menunjukkan kepemimpinan progresif yang mendorong terciptanya lingkungan sekolah nondiskriminatif dan bebas dari radikalisme, termasuk dalam ranah pembelajaran agama.

Kedua, ada pertanyaan penting terkait sejauh mana standardisasi cara berpakaian yang berkaitan dengan pandangan keagamaan dapat dibatasi. Secara umum, di keempat lokasi penelitian ini tidak ditemukan pemaksaan cara berpakaian berdasarkan norma agama. Meski demikian ada beberapa pola yang dapat dicatat, yaitu:

a. Dua lembaga berbasis Islam, BSI, dan MAN Insan Cendekia Sumatra Barat, mewajibkan perempuan memakai jilbab.
b. Dua lembaga lain yang tidak berbasis keagamaan, PLN, dan SMAN 53 Jakarta tidak mewajibkan perempuan memakai jilbab atau pakaian keagaman yang lain.

Pada kasus yang pertama, kewajiban memakai jilbab dapat dipahami sebagai kebijakan internal lembaga yang berbasis keagamaan. Pada kasus kedua, kebijakan untuk tidak mewajibkan pakaian keagamaan tertentu dapat dilihat sebagai praktik progresif moderasi beragama. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sah standardisasi berpakaian di BSI, termasuk dalam model jilbab bagi perempuan atau celana dan kemeja bagi laki-laki membatasi pilihan berpakaian berdasarkan keyakinan aliran keagamaan yang beragam, seperti jilbab lebar (jilbab syar'i) bagi perempuan dan celana cingkrang bagi laki-laki yang identik dengan aliran salafi, hijrah, dan yang serupa? Secara norma keagamaan, standar berpakaian (dress code) di BSI tidak melanggar ajaran Islam untuk menutup aurat bagi laki-laki atau perempuan, tetapi

tidak mengakomodasi style fashion aliran keagamaan yang beragam.

Ketiga, penelitian ini menemukan praktik moderasi beragama yang cukup maju di beberapa lembaga dari segi kesetaraan gender dan agama bagi jenjang karier. Dalam hal kesetaraan gender, praktik baik ditemukan di SMAN 53 Jakarta. Kepemimpinan puncak (kepala sekolah) yang seorang perempuan, kesetaraan kesempatan untuk menjadi pemimpin juga terjadi di tingkat organisasi siswa. Di SMAN 53 Jakarta, ketua OSIS adalah seorang perempuan, sementara ketua Majelis Perwakilan Kelas (MPK)-nya adalah seorang siswa laki-laki yang beragama Katolik. Di PLN penelitian ini juga tidak menemukan adanya indikasi diskriminasi berdasarkan agama dalam bidang karier. Pengakuan seorang karyawan (Kristen) yang mengaku terdiskriminasi oleh muslim dalam jenjang karier dibantah keras oleh karyawan lain, termasuk oleh seorang Executive Vice President. Sebagai seorang beragama Katolik, ia berhasil duduk di posisi yang cukup tinggi, Executive Vice President. Demikian juga karier perempuan di PLN diakui cukup terfasilitasi. Bahkan, diakui oleh beberapa karyawan, karier perempuan di PLN relatif lebih cepat ketimbang laki-laki. Di kedua lembaga lain, MAN Insan Cendekia dan BSI ditemukan indikasi pembatasan akses berdasarkan agama atau gender.

BAB 3
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

III.1. Kesimpulan

Temuan dari penelitian ini dapat dirangkum dalam beberapa poin berikut:

1. Gagasan dan program moderasi beragama secara umum diterima atau mendapatkan dukungan di keempat lokasi penelitian ini. Tidak ada resistensi terhadap moderasi beragama sebagaimana ditemukan di kalangan-kalangan yang melihat moderasi agenda anti-Islam. Meski demikian, penerimaan ini disertai dengan pemaknaan terhadap moderasi beragama yang beragam. Kami menemukan dua pola penerimaan yang bisa disebut penerimaan afirmatif dan penerimaan kritis.
    a. Penerimaan afirmatif terhadap moderasi beragama ditemukan dalam narasi-narasi yang mengaitkan moderasi beragama dengan sejumlah nilai, termasuk di antaranya sebagai berikut:
        - Nasionalisme inklusif yang melihat Indonesia didirikan oleh para pendiri bangsa yang plural.
        - Etika hubungan mayoritas dan minoritas agar tidak berlebihan, bersikap “mentang-mentang” dan mengucilkan kalangan minoritas.
        - Toleransi terhadap keyakinan dan hak beribadah masing-masing agama.
        - Kesadaran untuk menjaga hubungan sosial di lingkungan kerja tanpa membuat sekat berdasarkan agama.
        - Kesadaran bahwa moderasi beragama adalah bagian dari ajaran agama itu sendiri, atau syariat bagi muslim.

- Kesadaran untuk tidak merasa paling benar dan mudah mengafirkan dalam beragama.
- Kesadaran tentang pentingnya kebudayaan dalam beragama yang moderat.

b. Sejumlah pihak menunjukkan penerimaan kritis terhadap moderasi beragama. Hal ini ditunjukkan dalam penekanan pada pentingnya moderasi beragama untuk tidak dipromosikan secara represif dan tidak melewati koridor, yaitu mencampuri keyakinan dan urusan masing-masing agama. Oleh sebagian kalangan yang mempunyai perspektif kritis seperti ini, moderasi beragama dilihat sebagai cara beragama, dibedakan dengan agama itu sendiri, terbatas pada relasi sosial (muamalah) dan tersirat kewaspadaan atas potensi pendangkalan atau pelemahan akidah dari bagaimana moderasi beragama dipromosikan.

2. Dari segi pelaksanaan atau praktik, kami menemukan dinamika perubahan yang mengarah cukup kuat ke arah moderasi beragama. Di keempat lokasi penelitian ini gagasan moderasi beragama beresonansi dengan praktik-praktik pencegahan ekstremisme dalam konteks pengalaman lembaga masing-masing yang sudah berlangsung sebelumnya, dan tidak selalu menggunakan label moderasi beragama. Beberapa bentuk praktik moderasi beragama yang dapat dicatat adalah sebagai berikut:

   a. Di sektor lembaga publik (BSI dan PLN) praktik moderasi beragama ditemukan dalam berbagai bentuk seperti penerapan kode etik berbusana dan monitoring nilai-nilai perusahaan yang mendorong kultur profesional dan moderat, screening penceramah dan penerapan kode etik ceramah keagamaan untuk mencegah kebencian SARA, sentralisa-

si pengelolaan tempat ibadah, termasuk tata kelola dana sosial keagamaan, secara langsung di bawah direksi. Bentuk-bentuk praktik di atas meskipun membentuk ekosistem moderasi beragama, keberlangsungannya bergantung pada konsistensi peran direksi dalam menjaga nilai-nilai moderat.

b. Berkaitan dengan praktik moderasi beragama di lingkungan sekolah menengah atas negeri, kami menemukan pola yang berbeda di SMAN 53 Jakarta dan MAN Insan Cendekia Sumatra Barat.

    - Di SMAN 53 Jakarta, nilai-nilai moderasi beragama berkembang tidak hanya di ranah pengetahuan tetapi juga berbagai bentuk praktik pendidikan yang sudah berlangsung seperti Profil Pelajar Pancasila, budaya penguatan kepribadian luhur sekolah, dan lain-lain. Pimpinan sekolah mendorong langkah-langkah struktural yang cukup kuat dalam membangun ekosistem moderasi melalui kerjasama dengan sejumlah organisasi nirlaba yang mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan kebhinekaan, perubahan tata kelola organisasi ekstrakurikuler keagamaan yang mendapat supervisi secara ketat oleh guru pendamping, dan dukungan terhadap prinsip non-diskriminasi dalam kepengurusan organisasi kesiswaan baik dari segi jenis kelamin maupun agama. SMAN 53 Jakarta sebagai sekolah negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki demografi keagamaan siswa yang beragam. SMAN 53 Jakarta memberi kesempatan kepada

siswa untuk mendapatkan pengalaman relasi antar agama, meskipun kelas agama dan kegiatan keagamaan masih bersifat monoreligius.

- Di MAN Insan Cendekia yang seluruh siswanya muslim, moderasi beragama lebih banyak dipraktikkan dalam konteks toleransi intra-agama yang berkaitan dengan cara beribadah. Selain itu, praktik moderasi beragama dipahami dengan merujuk pada pengertian pengetahuan keagamaan baik di kelas-kelas Agama Islam maupun kegiatan di asrama. Sebagai madrasah di bawah naungan Kementerian Agama, MAN Insan Cendekia Sumatra Barat mendapatkan dukungan pendanaan untuk program moderasi beragama yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk seminar tentang moderasi beragama untuk guru dan murid setahun sekali, penunjukkan Duta Moderasi Beragama dan keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan moderasi beragama di luar sekolah.

3. Paralel dengan pola penerimaan afirmatif dan kritis terhadap moderasi beragama, cakupan praktik moderasi beragama juga menunjukkan hal serupa, sebagai berikut:
    a. Moderasi beragama dipraktikkan secara progresif di BSI dan SMAN 53 Jakarta. Praktik progresif ini ditunjukkan oleh upaya untuk memperkuat nilai-nilai moderasi beragama dengan cakupan yang lebih luas bagi praktik moderasi beragama. Pola progresif ini menghasilkan ekosistem kelembagaan yang menumbuhkan kreativitas dalam mempraktikkan moderasi beragama dan menutup peluang bagi

masuknya diskursus keagamaan ekstrem dan radikal.

b. Di kedua lokasi penelitian lain (PLN dan MAN Insan Cendekia) moderasi beragama dipraktikkan secara negosiatif. Hal ini ditunjukkan oleh upaya hati-hati oleh pimpinan lembaga untuk mempromosikan agenda nilai beragama dengan menghindari konfrontasi dan represi. Di kedua lokasi sejumlah kebijakan dan program menunjukkan preferensi bagi nilai yang sejalan dengan moderasi beragama, tetapi tidak sepenuhnya menutup ruang bagi pemahaman dan ekspresi keagamaan yang bernuansa Salafi dan bahkan HTI.

4. Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam dua hal. Pertama, Empat kasus yang dipilih dalam penelitian ini belum tentu mencerminkan kasus-kasus di lembaga publik lain. Kedua, proses pengumpulan data berlangsung dalam waktu singkat dengan pemilihan responden yang dibantu oleh pimpinan lembaga. Pengamatan lebih mendalam terhadap praktik sehari-hari dan wawancara dengan kalangan yang lebih luas dapat memberikan fakta yang lebih dari temuan-temuan di atas. Hal ini terutama dibutuhkan berkaitan dengan batasan-batasan toleransi yang menjadi catatan dalam penerimaan kritis, konsistensi penerapan kode etik penceramah, SOP dan praktik penyaluran dana sosial keagamaan sejauh mana memperhatikan nilai moderasi beragama, dan seterusnya.

III.2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan di atas, beberapa hal di bawah ini penting dilakukan untuk memperkuat promosi moderasi beragama di sektor lembaga publik:

1. **Kementerian Agama** perlu mendesain implementasi moderasi beragama yang menekankan kolaborasi multistakeholder (pemerintah, sektor privat, dan masyarakat), pelibatan sebanyak mungkin kalangan dan sejauh mungkin mempertimbangkan aspek keberlanjutan yang terus-menerus karena selama ini Kementerian Agama terlalu top down dan programatik, kurang mempertimbangkan pengalaman masyarakat yang sebetulnya sudah mempraktikkan moderasi beragama, meski tidak eksplisit disebut moderasi beragama.
2. **Kementerian BUMN** perlu merancang ekosistem yang lebih memberikan daya dorong bagi penguatan moderasi beragama dan pada saat yang sama memberikan perhatian terhadap kelompok atau individu yang dapat mengancam moderasi beragama. Membiarkan kelompok atau individu yang radikal atau berpotensi radikal dapat menjadi ancaman bagi ekosistem moderasi beragama di satu sisi dan iklim korporat di sisi lain.
3. **Sekolah/Madrasah**
   - » Merespon penerimaan kritis terhadap moderasi. Penerimaan kritis bukanlah hal yang sepenuhnya negatif, tetapi perlu mendapat respons agar tidak mendorong simpati terhadap ideologi ekstrem yang mengusung narasi kritis serupa.
   - » Memperkuat dan mengupayakan ide-ide kreatif praktik moderasi beragama, yang tidak sebatas program kegiatan eventual, tetapi mewujud dalam kebijakan dan transformasi kultur dan ekosistem kelembagaan yang ada.
   - » Mengupayakan kerjasama dengan sekolah dan lembaga publik dalam penguatan moderasi. Kerjasama dengan pihak luar terbukti berperan instrumental dalam ekosistem kelembagaan berdasarkan nilai-nilai moderasi beragama.
   - » Pimpinan madrasah dan sekolah dengan demografi siswa yang seragam, perlu mengupayakan kegiatan yang memfasilitasi perjumpaan antar agama, termasuk perjumpaan dengan kalangan minoritas.

4. **Organisasi masyarakat sipil** perlu mendukung kontekstualisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pengalaman kelembagaan. Promosi moderasi beragama perlu memberikan afirmasi terhadap nilai dan praktik sejalan yang sudah ada.

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
YOGYAKARTA
www.unu-jogja.ac.id

PROGRAM STUDI AGAMA DAN LINTAS BUDAYA
CENTER FOR RELIGIOUS AND CROSS-CULTURAL STUDIES
GRADUATE SCHOOL, UNIVERSITAS GADJAH MADA

International
NGO Forum
on Indonesian
Development

NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 info@infid.org www.infid.org

Follow Us :

INFID INFID_ID